



LAKIP 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014



Kata Pengantar

Bupati Tanjung Jabung Timur

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja
merupakan media penyampaian
informasi kinerja



LAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 merupakan media penyampaian informasi kinerja pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, LAKIP merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat kendali untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Kiranya dokumen LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Muara Sabak, Maret 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke.

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA



DAFTAR ISI

	BAB	Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Ringkasan Eksekutif		iv
BAB I Pendahuluan		1
A. Latar Belakang	BAB.I	1
B. Maksud dan Tujuan LAKIP	BAB.I	9
C. Landasan	BAB.I	9
D. Sistematika LAKIP	BAB.I	10
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja		
A. Visi dan Misi	BAB.II	2
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	BAB.II	4
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah	BAB.II	7
D. Prioritas Daerah	BAB.II	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja		
A. Indikator Kinerja	BAB.III	1
B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja	BAB.III	2
C. Kinerja Keuangan	BAB.III	30
BAB IV Penutup		
A. Kesimpulan	BAB.IV	1
B. Saran	BAB.IV	1
Lampiran 1 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2013		
Lampiran 2 : Penetapan Kinerja Kabupaten Tahun 2013		
Lampiran 3 : Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2013		
Lampiran 4 : Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Tahun 2013		
Lampiran 5 : Rencana Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2013		
Lampiran 6 : Pengukuran Kinerja Kabupaten Tahun 2013		
Lampiran 7 : Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2013		



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 merupakan LAKIP tahun ketiga dalam rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016. LAKIP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 melaporkan capaian kinerja (*Performance Results*) selama tahun 2013 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Pemerintah Daerah (RKPD) 2013 yang mengacu kepada RPJM Tahun 2011-2016 dan APBD Tahun 2013.

Sesuai dengan RPKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 menetapkan 414 program dan 1.579 kegiatan. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013 telah berhasil mencapai seluruh program yang ditargetkan meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100 %.

Perkembangan kinerja makro pembangunan tercermin pada indikator ekonomi. Salah satu hal yang menonjol pada pencapaian indikator ekonomi adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, bila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kebijakan memantapkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil



analisis atas capaian kinerja 2013 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan RKPD di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada indikator kinerja program yang capaian kerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan, serta meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
5. Lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kerjanya baik di tingkat nasional maupun regional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi



yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi khususnya informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan lebih diberdayakan.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas konsiderans umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya “*good governance*” pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya “*good governance*”.

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas



keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tersebut, adalah penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :

1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.

Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :



1. Potensi Wilayah

Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km² dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jambi atau seluas ± 10,2 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km² dan lautan/perairan seluas 3.560 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km² dan luas perairan (laut) ± 3.560 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :



Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	410,28	7,53
6.	Muara Sabak Timur	2	10	251,75	4,62
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
	JUMLAH	20	73	5.445,00	100,00

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2013

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/ kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa / gambut dengan ketinggian antara 0 - 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah / gambut ini biasanya ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 bertambah sebanyak 1.396 jiwa dari 211.522 jiwa pada tahun 2012 menjadi 212.918 jiwa pada



tahun 2013 atau dengan pertumbuhan 0,66 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2013 sebesar 39,10 jiwa/km² dan sex ratio 105.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Sadu merupakan Kecamatan dengan kepadatan terendah, namun hampir 60 % daerah ini merupakan kawasan Taman Nasional Berbak. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 dan 2013

No	Kecamatan	2012					2013*				
		Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Muara Sabak Timur	15.939	15.749	31.688	101	77,24	16.044	15.853	31.897	101	77,74
2	Muara Sabak Barat	8.167	7.843	16.010	104	63,59	8.221	7.895	16.116	104	64,01
3	Kuala Jambi	7.283	7.079	14.362	103	119,17	7.331	7.126	14.457	103	119,95
4	Mendahara	13.334	12.785	26.119	104	28,67	13.422	12.869	26.291	104	28,86
5	Mendahara Ulu	7.920	7.099	15.019	112	111,57	7.972	7.146	15.118	112	39,65
6	Geragai	11.469	10.221	21.690	112	112,21	11.545	10.288	21.833	104	76,51
7	Dendang	7.778	7.491	15.269	104	103,83	7.829	7.540	15.370	102	32,14
8	Nipah Panjang	13.145	12.847	25.992	102	102,32	13.232	12.932	26.164	105	111,48
9	Rantau Rasau	11.734	11.180	22.914	105	104,96	11.811	11.254	23.065	105	64,77
10	Berbak	5.146	4.903	10.049	105	104,96	5.180	4.935	10.115	105	52,02
11	Sadu	6.386	6.024	12.410	106	106,01	6.428	6.064	12.492	106	6,86
Jumlah		108.301	103.221	211.522	105	104,92	109.016	103.902	212.918	105	39,10

*) Angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah



dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan Katalog BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1403.1506, unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sektor : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas, dan air bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel, dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) Jasa-jasa. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (*current price*) maupun berdasarkan harga konstan (*constant price*).

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga berlaku mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Tanjung Jabung Timur. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2012, karena tingginya angka inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM dan turunnya harga komoditas sektor pertanian. Namun mencapai performance plan tahun 2013 yang telah ditetapkan, serta meningkatnya Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 atas harga konstant dari tahun 2012 yaitu dari IDR 2.758.000,44 menjadi IDR 2.936.131,13. Peningkatan ini merupakan indikasi dari membaiknya perekonomian kabupaten ini.

Tabel 1.3
PDRB (dalam jutaan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%)
Tahun 2012 – 2013 (Harga Konstan)

No.	Sektor	2012		2013*	
		PDRB	Laju Pertumb	PDRB	Laju Pertumb
1.	Pertanian	742.721,30	4,34	770.319,59	3,72
2.	Pertambangan dan penggalian	1.076.565,73	11,14	1.179.247,24	9,54
3.	Industri pengolahan	253.945,07	3,53	261.620,12	3,02
4.	Listrik, gas, dan air bersih	3.472,22	8,60	3.727,89	7,36
5.	Bangunan	36.933,39	6,52	38.995,13	5,58
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	417.230,41	8,70	448.309,03	7,45
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	100.609,22	3,70	103.796,40	3,17
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	35.245,20	4,68	36.657,45	4,01
9.	Jasa-jasa	91.277,90	2,79	93.458,30	2,39
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.758.000,44	7,44	2.936.131,13	6,37

* angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah



Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan-hotel dan restoran, industri pengolahan, jasa-jasa, pengangkutan – komunikasi, konstruksi – bangunan, keuangan – persewaan – jasa perusahaan, serta listrik – gas dan air bersih.

Untuk lebih jelasnya dapat diikuti pada tabel 1.4. berikut:

Tabel 1.4
Struktur Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%) Atas Harga Konstan Tahun 2012-2013

No.	Sektor	2012	2013*
1.	Pertanian	26,93	26,24
2.	Pertambangan dan penggalian	39,03	40,16
3.	Industri pengolahan	9,21	8,91
4.	Listrik, gas, dan air bersih	0,13	0,13
5.	Bangunan	1,34	1,33
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	15,13	15,27
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,65	3,54
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	1,28	1,25
9.	Jasa-jasa	3,31	3,18

* angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata per penduduk.

Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan per kapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan per kapita riil meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan riil yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat harga di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi.



Tabel 1.5
PDRB Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2013

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		
TAHUN	PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN	PERTUMBUHAN
2011	12.199.351,00	-
2012	13.067.562,05	7,12
2013*	13.789.962,00	5,53

*angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2013 nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 13.789.962,00 per tahun atau Rp 1.149.163,50 per bulan. Angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebesar Rp 259.250,00 perkapita per bulan. Bila hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar berarti lebih mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi.

2. Kelembagaan

Penataan kelembagaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang : Organisasi Perangkat Daerah. Penyesuaian struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01, 02, 03 dan 04 Tahun 2008, susunan tersebut terdiri dari :

- 1) Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 2) Sekretariat Daerah;
- 3) Sekretariat DPRD;
- 4) Tiga Asisten Daerah, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi 3 bagian yaitu Bagian Pemerintah Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Humas; Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi 3 bagian yaitu Bagian Pembangunan, Bagian Sumber Daya Alam, dan Bagian Perekonomian; Asisten Administrasi Umum yang membawahi 3 bagian yaitu Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, dan bagian umum.
- 5) Empat belas Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesbang, Pol dan Linmas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Kantor



Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- 6) Dua belas Dinas Daerah yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Dinas Peternakan.
- 7) Sebelas kecamatan yang terdiri dari kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara Ilir, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Berbak, dan Kecamatan Sadu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 adalah untuk memberikan gambaran, tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2013.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :



- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- e. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 01,02,03 dan 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2016.
- i. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
- j. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

D. SISTEMATIKA LAKIP 2013

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2013 tersebut, diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance plan*) tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.



Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas konsidi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016 dan Rencana Kinerja 2013. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2013.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2013 termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016 dan Rencana Kinerja 2013. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2013.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2011. Disamping itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang



(*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

RPJM setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju ke sana' dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju atas keadaan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan amanat publik. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 dengan rumusan :

***MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA, ADIL , MANDIRI, UNGGUL,
DEMOKRATIS DAN AGAMIS
(SAMUDRA)***



-
- Sejahtera** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.
- Adil** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Mandiri** : bahwa penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mengedepankan profesionalisme, pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi asas keahlian, keterampilan dan tata pemerintahan yang baik.
- Unggul** : bahwa tatanan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor kehidupan. Produktivitas baik pemerintah dalam layanannya kepada masyarakat, hasil usaha masyarakat tani, nelayan, dan industri kecil dan menengah yang mampu dikelola dengan standar global, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi yang memiliki nilai kompetitif atau berdaya saing secara lokal, nasional, regional dan internasional.
- Demokratis** : bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat dilandasi dengan kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat sesuai dengan tatanan dalam negara hukum.
- Agamis** : bahwa kehidupan bermasyarakat berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang taat, didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Guna mengoperasionalkan visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2011 – 2016, sebagai berikut :

1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas)
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional.



4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas)
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016, maka ditetapkan 9 (sembilan) tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun :

- 1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian masyarakat hingga wilayah terpencil.
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi.
- 3) Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- 4) Mewujudkan roda perekonomian masyarakat dan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 5) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing.
- 6) Menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan.
- 7) Mewujudkan penataan zona dan melestarikan kawasan perlindungan situs budaya tradisional sebagai pusat penelitian budaya, wisata budaya dan warisan budaya.
- 8) Terciptanya keselarasan, kedamaian, ketentraman dan jalinan persaudaraan antar umat beragama, antar suku, antar golongan masyarakat.



- 9) Tersedianya sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi sebagai media menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

- 1) Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi
- 2) Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa
- 3) Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat
- 4) Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak Barat – Muara Sabak Timur - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)
- 5) Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik
- 6) Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.
- 7) Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.
- 8) Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)
- 9) Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja
- 10) Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
- 11) Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit
- 12) Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan
- 13) Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.
- 14) Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 15) Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).
- 16) Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN



- 17) Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.
- 18) Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.
- 19) Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah.
- 20) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- 21) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
- 22) Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi
- 23) Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga
- 24) Pengelolaan sumber daya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal
- 25) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
- 26) Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.
- 27) Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap
- 28) Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.
- 29) Pelayanan dan Perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
- 30) Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- 31) Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.
- 32) Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
- 33) Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.



- 34) Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup
- 35) Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.
- 36) Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah
- 37) Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku
- 38) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial
- 39) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.
- 40) Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 41) Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.
- 42) Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan
- 43) Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.
- 44) Pengembangan dan pendidikan pemuda/pemudi Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu dirumuskan strategi pembangunan. Dalam merumuskan strategi pembangunan harus memenuhi kriteria yang mencakup hubungan rasional antara Visi dan Misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih. Kemudian memperlihatkan hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun dan kemudian dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Untuk itu ditetapkan strategi pembangunan Tanjung Jabung Timur lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Misi I : Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan Berkeadilan.

- 1) Pengembangan sarana-prasarana diorientasikan sesuai strategi pengembangan ekonomi wilayah serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum.



- 2) Aksesibilitas ke dan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus terus dijamin dan ditingkatkan, tidak saja ke pusat ibukota Provinsi, tapi ke beberapa pusat perekonomian dan administrasi di wilayah yang lain.
- 3) Menekankan konsep agri bahari dalam pembangunan pedesaan.
- 4) Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan.
- 5) Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan listrik.
- 6) Pemenuhan kebutuhan air bersih yang merata.
- 7) Menyediakan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian terutama tanaman pangan.
- 8) Percepatan pembangunan jembatan yang menghubungkan Delta Berbak hingga Kawasan Ujung Jabung melalui *conccurent strategy* antara pemerintah pusat - provinsi – kabupaten.
- 9) Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 10) Memfasilitasi penyiapan lokasi sebagai kawasan ekonomi strategis.
- 11) Penyiapan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi strategis.
- 12) Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman.

Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas).

- 1) Peningkatan penataan sistem pelayanan pendidikan untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
- 2) Menyiapkan SDM yang terampil yang siap bekerja, untuk itu Balai Latihan Kerja (BLK) akan dilengkapi dengan sarana fasilitas pelatihan yang modern dan memadai.

Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional.

- 1) Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi daerah.
- 2) Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis *e-budget* dan *e-audit*.
- 3) Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan potensi dan kemampuan
- 4) Peningkatan pelayanan terpadu kecamatan.
- 5) Penerimaan CPNS berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah.



- 6) Melakukan evaluasi kebutuhan berdasarkan beban kerja untuk mengetahui formasi CPNS setiap tahun.
- 7) Pelaksanaan rekrutmen CPNS yang didasarkan pada kebutuhan beban kerja dan bebas KKN.
- 8) Peningkatan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) untuk meningkatkan kinerja pegawai daerah, insentif guru PNS dan Non PNS, Honorer Daerah dan pejabat pemerintahan sampai ke tingkat RT.
- 9) Peningkatan insentif untuk guru PNS dan Non PNS daerah terpencil.
- 10) Pemberian insentif untuk pegawai SARA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 11) Pemberian penghargaan kepada pegawai SARA teladan.
- 12) Pembentukan Perda tentang pelayanan publik.
- 13) Penguatan lembaga pelayanan terpadu satu pintu/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
- 14) Membangun sistem komputerisasi e-KTP.
- 15) Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- 16) Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Misi IV : Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya.

- 1) Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik.
- 2) Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata.
- 3) Operasionalisasi dan permodalan BUMD dengan mitra strategis.
- 4) Menciptakan Pemenuhan Kecukupan pangan daerah.
- 5) Meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas.
- 6) Terselenggaranya upaya-upaya untuk penurunan tingkat pengangguran.
- 7) Menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- 8) Menjadikan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
- 9) Peningkatan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna.



- 10) Peningkatan efisiensi, daya saing modernisasi serta nilai tambah komoditi tanaman pangan terutama padi, perkebunan dan kelautan.
- 11) Peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak dan air tawar serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai.
- 12) Pembangunan sektor Migas dan Bahan Tambang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan.
- 13) Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan melibatkan masyarakat
- 14) Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan memperhatikan dan memperhitungkan kerusakan lingkungan dan fasilitas umum seperti infrastruktur sebagai bagian dari biaya produksi pengelolaan.
- 15) Pengelolaan lingkungan dilakukan secara bijaksana untuk meminimalkan dampak lingkungan dan bencana alam.
- 16) Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing.

Misi V : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).

- 1) Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan.
- 2) Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil.
- 4) Pendayagunaan sumberdaya yang ada baik berupa fasilitas infrastruktur kesehatan, perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan yang efektif.
- 5) Pemberian pelayanan yang maksimal bagi keluarga untuk menjadi Keluarga andalan.
- 6) Pendampingan dan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak.

Misi VI : Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat.

- 1) Pemetaan sengketa lahan yang melibatkan pengusaha dan masyarakat.
- 2) Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan secara musyawarah dan damai.



Misi VII : Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.

- 1) Penyampaian informasi dan pemberian pemahaman para pihak tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional.
- 2) Fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Memotivasi masyarakat untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 4) Menindak setiap pelaku yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi VIII : Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

- 1) Penyiapan bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana.
- 2) Adanya sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT.
- 3) Peningkatan dan pembinaan generasi muda bidang keagamaan.
- 4) Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku budaya yang ada di daerah.
- 5) Adanya fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial.
- 6) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyampaian aspirasi secara demokratis.
- 7) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan.

Misi IX : Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

- 1) Meningkatkan ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Adanya pembinaan atlet sejak dini, berkala dan berkelanjutan.
- 3) Pemberian penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi.
- 4) Memfasilitasi pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional.



2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah menitik beratkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Misi I : Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan Berkeadilan.

- 1) Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi.
- 2) Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan kecamatan dan desa-desa.
- 3) Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar.
- 4) Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal.
- 5) Pengembangan prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi darat dan sungai.
- 6) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan.
- 7) Pengembangan transportasi air (laut dan sungai) dengan memfokuskan pada pengembangan kapasitas pelabuhan serta pemeliharaan alur sungai.
- 8) Pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, pergudangan dan pengolahan hasil pertanian.
- 9) Pengembangan infrastruktur perikanan seperti fasilitas pelelangan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pergudangan.



- 10) Pengembangan energi menciptakan alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.
- 11) Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan.
- 12) Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan.
- 13) Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga.
- 14) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi dengan menggunakan alat berat.
- 15) Membangun komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan provinsi dengan *inter-governmental networking policy*.
- 16) Menyempurnakan dan menyederhanakan pemberian izin usaha melalui sistem satu pintu.
- 17) Memfasilitasi investor dalam kemudahan berusaha dan pembebasan lahan.
- 18) Menyusun master plan pendukung pengembangan Kawasan Ujung Jabung yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan.
- 19) Pengembangan wilayah pertumbuhan.
- 20) Pemenuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui bedah rumah.
- 21) Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan, desa dan pesisir.
- 22) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.
- 23) Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas).

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan gratis untuk tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat.
- 2) Meningkatkan pengaturan dalam bentuk perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan gratis bagi SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat.



- 3) Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian beasiswa untuk siswa SMU/ sederajat yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi.
- 4) Pendirian perguruan tinggi bidang ilmu yang relevan dengan potensi di Tanjung Jabung Timur.
- 5) Menyiapkan tenaga profesional yang berasal dari Tanjabtim untuk pendidikan Diploma III Perikanan dan Diploma lainnya.
- 6) Pemberian beasiswa berkelanjutan untuk keluarga tidak mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
- 7) Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan.
- 8) Peningkatan kualitas fasilitas pelatihan modern dan instruktur yang berkualitas di BLK.
- 9) Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat penyandang cacat untuk mengikuti kursus di BLK.

Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional.

- 1) Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- 2) Penyempurnaan secara terus menerus implementasi *e-budget* dan *e-audit*.
- 3) Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan anggaran berbasis *e-budget* dan *e-audit*.
- 4) Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan wilayah sangat terpencil, terpencil dan tidak terpencil.
- 5) Menetapkan kecamatan berbasis pelayanan terpadu melalui peraturan kepala daerah.
- 6) Penerimaan CPNS dengan memprioritaskan calon yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7) Formasi CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD.
- 8) Sistem recruitment CPNS yang bebas KKN.
- 9) TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak terpencil).
- 10) Insentif Guru ditingkatkan sesuai dengan kemampuan daerah.
- 11) Pemberian insentif bagi pegawai SARA di setiap desa/kelurahan.
- 12) Pemberian penghargaan bagi pegawai SARA teladan di setiap desa/kelurahan.



- 13) Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah.
- 14) KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik.
- 15) Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan terpadu.
- 16) Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten.
- 17) Pengembangan *e-Government*.
- 18) Pelayanan publik bebas dari KKN.

Misi IV : Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya.

- 1) Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik.
- 2) Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Kabupaten Tanjab Timur.
- 3) Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
- 4) Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang didasari oleh capaian indikator ekonomi.
- 5) Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK.
- 6) Memantapkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD.
- 7) Penguatan LKMP melalui bantuan kredit modal kerja.
- 8) Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
- 9) Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.
- 10) Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
- 11) Peningkatan sistem kewaspadaan dini gizi dan pangan.



- 12) Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
- 13) Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.
- 14) Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
- 15) Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 16) Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif.
- 17) Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha.
- 18) Pengembangan Koperasi yang handal.
- 19) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya lokal.
- 20) Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi.
- 21) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja.
- 22) Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja.
- 23) Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 24) Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.
- 25) Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat.
- 26) Pembangunan pertanian diarah pada pemanfaatan lahan berdasarkan potensi agronomis sehingga menjamin produktivitas lahan dan kepentingan strategis.
- 27) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terutama pada ke fungsi penggunaan lain terutama pada kawasan yang secara agronomis sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan.



- 28) Memberikan bantuan fasilitas dan peralatan produksi pertanian, permodalan, subsidi, kompensasi dan regulasi yang memihak petani tanaman pangan.
- 29) Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
- 30) Penguatan kemampuan teknis budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan daya saing serta posisi tawar petani.
- 31) Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petani, peternak dan nelayan dilakukan melalui peningkatan kemampuan berorganisasi secara partisipatif. Penguatan kelembagaan ekonomi.
- 32) Peningkatan nilai tambah produk pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- 33) Peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam penangkapan ikan laut.
- 34) Peningkatan produksi perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan darat.
- 35) Peningkatan sarana dan prasarana nelayan melalui pemberian bantuan pompong dan perlengkapan alat tangkap.
- 36) Pengelolaan migas dan bahan tambang harus diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lestari secara ekonomi, sosial dan ekologi.
- 37) Pembangunan dan pengelolaan migas dan bahan tambang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan pengelolaan.
- 38) Membuat kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan memperhitungkan dampak-dampak terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 39) Membangun kesadaran semua pengelola sumberdaya alam migas dan bahan tambang akan dampak yang bisa timbul dari kegiatan eksploitasi dan transportasi hasil pengelolaan.
- 40) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
- 41) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
- 42) Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung



peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal.

- 43) Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya.

Misi V : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).

- 1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil.
- 2) Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
- 3) Memenuhi rasio tenaga kesehatan yang memadai sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
- 4) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan secara simultan terutama memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di perdesaan dan wilayah terpencil.
- 5) Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu pada masing-masing kecamatan dan desa.
- 6) Pembinaan masyarakat pada progarm Keluarga Berencana.
- 7) Pelayanan Kontrasepsi.
- 8) Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin.
- 9) Pendampingan pelayanan kesehatan keluarga dan anak.
- 10) Perlindungan bagi Perempuan dan Anak

Misi VI : Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat.

- 1) Kejelasan posisi para pihak dalam sengketa lahan.
- 2) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan.
- 3) Terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa lahan.
- 4) Terbentuknya kesepakatan bersama tentang mekanisme dan tata cara.

Misi VII : Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.

- 1) Terciptanya penataan sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional.
- 2) Pemetaan zonasi kawasan konservasi.



- 3) Tindakan tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
- 4) Meningkatkan sikap dan tindakan positif para pihak untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup setiap tahun.
- 5) Meningkatnya motivasi para pihak untuk menjaga lingkungan.
- 6) Meningkatnya sikap tegas pemerintah daerah untuk penerapan sanksi kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup.

Misi VIII : Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

- 1) Pemberian santunan bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana.
- 2) Sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT oleh aparat yang berwenang dengan melibatkan tokoh masyarakat.
- 3) Pembinaan generasi muda melalui lembaga keagamaan.
- 4) Pelestarian kesenian tradisional.
- 5) Terwujudnya pengembangan wisata bahari dan wisata religi.
- 6) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 7) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat.
- 8) Penyiapan media penyaluran aspirasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 10) Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial.
- 11) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.
- 12) Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.

Misi IX : Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

- 1) Pengembangan fasilitas olah raga berkualitas di setiap kecamatan.



- 2) Pembinaan generasi muda sejak dini untuk menjadi atlit sesuai dengan minat dan bakat.
- 3) Penyiapan anggaran bagi atlit daerah yang berprestasi sesuai dengan keuangan daerah.
- 4) Pembinaan pemuda/pemudi Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional

D. PRIORITAS DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2011-2016, sebagai berikut :

- 1 Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan, dengan fokus :
 - a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, pemanfaatan transportasi sungai, pelabuhan serta infrastruktur Listrik.
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan mewujudkan tersedianya Air Bersih layak minum.
 - c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ekonomi seperti pasar, tempat pelelangan dan infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.
- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai serta pendidikan gratis berkualitas, dengan fokus :
 - a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas
 - b. Pemerataan jangkauan akses terhadap pendidikan berkualitas
 - c. Peningkatan pendidikan gratis yang berkualitas terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dari tingkat SD sampai SLTA.
 - d. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan, terutama pendidikan kelautan dan perikanan serta pengembangan ternak.
 - e. Peningkatan Kualitas Layanan dan akses perpustakaan di semua wilayah dan lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional, dengan fokus :
 - a. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik



- b. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum
 - c. Mendorong pelaksanaan anggaran yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja pada semua SKPD dan level Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - d. Peningkatan kompetensi birokrasi sehingga dapat bekerja lebih profesional.
 - e. Peningkatan Kesetaraan Gender.
4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa, dengan fokus :
- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian perkebunan, perikanan, dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan.
 - b. Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
 - c. Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing.
 - d. Pengembangan usaha agroindustri.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas) dengan fokus:
- a. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan kesemua wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang prima bagi semua penduduk.
 - c. Meningkatkan pelayanan berobat gratis yang berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan.
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat, program ini fokus pada:
- a. Identifikasi permasalahan sengketa lahan yang terjadi di semua Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. Membantu dan memfasilitasi permasalahan sengketa lahan yang terjadi ditengah masyarakat terutama permasalahan sengketa lahan dengan perusahaan.
 - c. Menyelesaikan dengan cepat penyelesaian sengketa lahan dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional, dengan fokus :
- a. Penataan kembali zonasi dan perlindungan kawasan konservasi dengan tegas dan konsisten berdasarkan hukum untuk menjaga lingkungan hidup yang baik.



- b. Penataan dan perlindungan terhadap peninggalan budaya dan situs baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam proses.
 - c. Peningkatan dan pengembangan budaya tradisional melalui berbagai kegiatan, kajian dan event yang mendorong pengembangan budaya.
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan fokus:
- a. Peningkatan peran agama dalam mendorong kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang lebih dinamis.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
 - c. Meningkatkan toleransi beragama yang lebih harmonis ditengah masyarakat.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi, dengan fokus:
- a. Membangun fasilitas olahraga yang representatif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olah raga.
 - b. Meningkatkan pencarian atlit olah raga yang berbakat terutama di tingkat SD, SMP dan SLTA.
 - c. Meningkatkan pembinaan atlit untuk berprestasi dan bagi yang berprestasi diberikan bea siswa sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
 - d. Peningkatan Peran Pemuda untuk mendorong Prestasi Olahraga

Dari prioritas dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016. Maka untuk prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam RKPDP Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan

- 1) Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintah pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ISO dan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah, dan Renja SKPD berbasis kinerja yang terukur secara kuantitatif;
- 3) Penyempurnaan implementasi manajemen kepegawaian berbasis *Merried System* dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai;
- 4) Memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan dan unit pengelola teknis di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;
- 5) Perlakuan khusus untuk PNS yang dinas didaerah *remote area*.



2. Infrastruktur

- 1) Pembangunan jalan poros ekonomi seperti ruas jalan zone V dan ruas jalan Sabak Timur-Nipah Panjang dengan kekuatan jalan; MST > 8 ton;
- 2) Pembangunan tanggul dan jaringan irigrasi;
- 3) Memperluas dan meningkatkan jalan produksi desa dan jembatan;
- 4) Pemenuhan sarana fasilitas keselamatan jalan;
- 5) Pemenuhan air minum dan sarana sanitasi penduduk;
- 6) Perluasan jaringan listrik interkoneksi ke semua kecamatan dan 70 % desa;
- 7) Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik seperti untuk daerah *remote area* dengan PLTS.

3. Pendidikan

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah maupun tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun yang merata;
- 3) Regulasi peraturan wajib belajar 12 tahun melalui penyusunan PERDA;
- 4) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa SMA dan SMK / sederajat melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga dan praktikum);
- 5) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- 6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
- 7) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
- 8) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
- 9) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- 10) Pemenuhan kebutuhan guru di daerah sangat terpencil di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak;
- 11) Perlakuan khusus untuk sekolah di remote area (khususnya di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak);
- 12) Pemantapan tata kelola BOS sehingga efisien dan efektif;
- 13) Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas guru;
- 14) Peningkatan status sekolah (SD berbasis IT, RSSN, SSN, RSBI, SBI);
- 15) Meningkatkan akses pelatihan dan keterampilan kerja melalui pembinaan dan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 16) Meningkatkan APM SD/sederajat menjadi sebesar 94,60 %;



- 17) Meningkatkan APM SMP/ sederajat menjadi sebesar 79,56 %;
- 18) Meningkatkan APK SMA/ sederajat menjadi sebesar 76,00 %;
- 19) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan paket A, B dan C;
- 20) Memantapkan pengelolaan dan proses belajar Pendidikan Tinggi kerjasama Universitas Jambi dengan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur.

4. Kesehatan

- 1) Meningkatkan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 90 persen;
 - b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen;
 - c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen dan imunisasi campak menjadi sebesar 90 persen;
 - d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 90 persen;
 - e. Menurunnya persentase balita gizi buruk secara bermakna, dan semua balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar;
 - f. Terlaksananya penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah;
 - g. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi sebesar 70%;
 - h. Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 70%;
 - i. Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- 2) Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 85 %;
- 3) Semua penduduk miskin memiliki kartu Jaminan Kesehatan;
- 4) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan :
 - a. meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 75% dan yang disembuhkan menjadi sebesar 86%; dan
 - b. meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,75 per 1.000 penduduk.
- 5) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB;



- 6) Meningkatnya sarana kesehatan yang merata melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan satelitnya serta RSUD yang terakreditasi;
- 7) Penyusunan PERDA tentang kesehatan.

5. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan

- 1) Mempercepat Pengembangan kawasan agropolitan, dengan membentuk satgas pengembangan;
- 2) Penguatan modal, saprodi dan komposter;
- 3) Mempersiapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perangkat terkait dengan Implementasi Undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Penguatan dan optimalisasi lembaga penyuluhan Daerah dan BP3K di kecamatan/Desa, melalui peraturan tatalaksana dan tenaga penyuluh; pemenuhan peralatan kerja, serta menjadikan BP3K sebagai Demplot dan sekolah lapangan bagi siswa dan petani;
- 5) Optimalisasi BBI Dendang dan TPI Nipah Panjang, PPI Teluk Majelis, Pabrik Es, tambak dan keramba rakyat;
- 6) Pelaksanaan perluasan lahan pertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan Tata Ruang;
- 7) Meningkatkan produksi pertanian dan produktifitas petani;
- 8) Ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme distribusi pupuk;
- 9) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi;
- 10) Bantuan modal kerja Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,- per desa;
- 11) Penyiapan sarana untuk mendidik tenaga profesional melalui lanjutan pembangunan BLK, peralatan dan instruktur, serta pelatihan keterampilan yang berkualitas;
- 12) Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan memperoleh modal usaha, bimbingan dan peralatan;
- 13) Optimalisasi fungsi koperasi (KUD) pembentukan lembaga ekonomi mikro (Bumdes), serta kemudahan memperoleh modal usaha;
- 14) Memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui peningkatan pelayanan terpadu;



- 15) Pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pasar kecamatan, dan bantuan modal kerja;
- 16) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan;
- 17) Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan;
- 18) Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing;
- 19) Pengembangan usaha agroindustri;
- 20) Pengembangan kelembagaan keuangan mikro;
- 21) Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2013 sebesar 91,75 %;
- 22) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 sebesar 6,37.

6. Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembentukan modal bentuk natura untuk peningkatan pendapatan (bibit sapi, tanaman, palawija, saprodi, kapal dan alat tangkap, dan sebagainya) bagi keluarga miskin dan hampir miskin.
- 2) Menggerakkan perekonomian pedesaan, dengan meningkatkan ADD secara bertahap hingga mencapai 10% dari dana perimbangan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Berbagai kegiatan pembangunan yang dikerjakan dengan teknologi sederhana, padat karya serta dengan nilai dibawah Rp. 200 juta harus dilaksanakan dengan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dibiayai melalui ADD.
- 3) Mengurangi beban keluarga miskin dan hampir miskin untuk memperoleh pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan) dan bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan yang layak, santunan kematian.
- 4) Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan keluarga miskin dan keluarga dengan kondisi khusus.
- 5) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan
- 6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.



7. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup

- 1) Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Wilayah
- 2) Mengurangi lahan dan DAS kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan, normalisasi saluran/sungai, pembangunan tanggul serta peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut dengan pelibatan masyarakat secara aktif.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan.
- 4) Tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH.

8. Hukum, Sosial, Budaya dan Seni Olahraga

- 1) Meningkatkan kualitas legislasi melalui program legislasi daerah (penyusunan rencana PERDA) di bidang kesehatan dan pendidikan serta PERDA pembentukan Unit Pelayanan Teknis, serta Perda-Perda lain;
- 2) Meningkatkan penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi melalui penyuluhan/sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan PERDA terkait HAM dan pemberantasan korupsi;
- 3) Pembinaan dan penggalian seni budaya daerah melalui pembangunan secara bertahap sanggar seni dan budaya di Kecamatan;
- 4) Apresiasi seni budaya agar kelestariannya tetap terjaga;
- 5) Pengelolaan cagar budaya dengan baik;
- 6) Mengenalkan seni budaya dan pariwisata melalui web-site (www.tanjabtimgab.go.id);
- 7) Pembinaan cabang olah raga sejak dini dan cabang olah prestasi;
- 8) Menjalin kerjasama dengan Kota/Kabupaten dalam Provinsi dan luar Provinsi untuk menarik minat masyarakat, diantaranya melalui paket bersama dan pengembangan "Sister City";
- 9) Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, seni budaya dan industri kreatif;
- 10) Terselenggaranya paket riset-riset dasar, terapan dan paket riset insentif.

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.

E. PENETAPAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013. Penetapan Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat



pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Berikut kami sampaikan Penetapan Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2013 sebesar Rp. 994.345.082.670,72 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 355.535.450.029,87 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 638.809.632.640,85.

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI I : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN			
1.	Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	Panjang Jalan Kabupaten	966,55 Km
		Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44,70%
		Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	81,27%
		Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	12 mobil pickup; 9 truk PS; 1 Kapal ro-ro
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	86.600 orang
		Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	3 unit
		Jumlah angkutan darat	10.565 unit
		Pemasangan rambu-rambu	135
		Jalan desa dilalui roda empat	207,80 KM
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	107 m/kendaraan
		Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	615, 28 KM
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50 M
		Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	43,75%
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	17%
Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	19%		
2.	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540
		Peningkatan rasio elektrifikasi	70%
		Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	30,00%
3.	Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	75,00%
		Luas irigasi dalam kondisi baik	75,00%
		Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Pembangunan Tanggul : 59.502 M ¹ ; rehab Irigasi : 42.984 M ¹ ; Pintu air : 5 unit; OP : 352.001 M



4.	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Transportasi / komunikasi dua arah yang efektif	efektif
5.	Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540
		Peningkatan jaringan telekomunikasi	Kabel 3%; Seluler 90%
6.	Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	1 Unit
		adanya kemudahan berinvestasi	32 jenis izin
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	2 dokumen
7.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	32,00%
		Persentase rumah layak huni	89,60%
		Persentase peningkatan rumah sehat	47,20%
		Rasio pemukiman layak huni	76,83%
		Akses sanitasi layak	47,20%
		Persentase penanganan sampah	36,00%
		Adanya pola kemitraan dengan Swasta	2 pengembangan perumahan
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI (PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS)			
1.	Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	Angka Rata-rata lama sekolah	7,16 Tahun
		Angka melek huruf	93,90%
		APK SD/Sederajat	113,98%
		APK SMP/Sederajat	105,10%
		APK SMA/Sederajat	76%
		Meningkatnya APK PAUD	46,79%
		Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Sederajat	94,60%
		APM SMP/Sederajat	62,78%
		APM SMA/Sederajat	62,78%
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	96,28
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	1 : 151
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	1 : 14
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	208+44
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	82,76
		Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	229 unit
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	1 : 326
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	1 : 12
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	32
		Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	40,00%
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	1 perda
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/ sederajat	99,90%
		Berdirinya perguruan tinggi	1 Perguruan Tinggi
		Jumlah perpustakaan (unit)	2
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.214 orang
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	31.527
Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	45 siswa SDLB		
2.	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	1 unit



MISI III : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL			
1.	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	69,00%
		Jumlah PNS Daerah	4.820
		Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	93,00%
		Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas intern	65%
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,8/10.000 penduduk
2.	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran
3.	Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kelurahan (100%)
		Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	5 jenis pelayanan
4.	Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya Prioritas Calon CPNS	40%
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 kali ujian kompetensi
		CPNS yang bebas KKN	100%
5.	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	38,1 Milyar
6.	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Insentif Pegawai SARA meningkat	Rp. 600.000,00
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Rp. 600.000,00
7.	Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	1 perda
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Meningkat 24,89%
		Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terealisasi di 11 kecamatan
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	90%
		Rasio pasangan berakte nikah	55%
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	100%
		Laju pertumbuhan penduduk	0,67%
		Pengembangan sistem jaringan e-government	7 MBPS
		Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	1 website
		Sistem informasi daerah berbasis website	1 website
Pelayanan publik bebas dari KKN	100%		
MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA LAINNYA.			
1.	Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	32 jenis perizinan
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	US\$ 16.302
2.	Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	Nilai Ekspor (US\$)	87,67 Juta
		Nilai Impor (US\$)	17,35 Juta
		Laju inflasi	4,10%
		PDRB atas harga berlaku	IDR 13.016.251,56 Juta
		Pertumbuhan PDRB	6,37
PDRB per kapita (Rp.juta)	13,40		



		Jenis dan jumlah bank	7
		Jumlah Penduduk (jiwa)	214.517
		Jumlah Sentra industri kecil	10 unit
3.	Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat
		Kantaya LKPM	Meningkat
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Tingkat kemiskinan	8,75
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	91,75
		Lumbung pangan	3
		desa ketahanan pangan	14 desa mandiri pangan
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	93 Gapoktan
		Jumlah Desa Rawan Pangan	28 Desa
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	60
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	113
		Jumlah UKM	352 unit
		Jumlah/UKM yang berperan	352 unit
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	20 orang/unit
		UKM Unggulan	35 UKM
		Jumlah koperasi handal	272 koperasi
		Persentase koperasi aktif	36,40%
		Produk Unggulan	14 produk
5.	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	Jumlah TK yang terserap	1.240
		UMR	Rp. 1.200.000
		Jumlah Pelatihan	6 kali
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	15 perusahaan
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	97,50%
		Angka kesempatan kerja	102,094 orang
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	45,20%
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11,30%
		Partisipasi angkatan kerja wanita	39,55%
6.	Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	1 biro
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	50%
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	10
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkatnya kunjungan wisata 25%
		Kunjungan wisata (orang)	12.500
		Sarana wisata (hotel & restoran)	6 + 272
		Objek Wisata	10
7.	Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Potensi Lahan	56.496 Ha
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	31.851 Ha
		Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	13.030 Ha
		Penguatan Kelompok Tani	1.168 Kelompok
		Nilai Tukar Petani (%)	97,72%
		Produktivitas Padi	36,5 Kwt/ha
		Produktivitas kedelai	13,7 kwt/ha
		Produktivitas karet	0,30 ton/ha
		Produktivitas kelapa sawit	2,49 ton/ha
		Produktivitas kopi	0,54 ton/ha
		Produksi Padi	112.828 ton
		Produksi Jagung	5.647 ton
		Jumlah Sapi (ekor)	14.300 ekor
		Jumlah Kambing (ekor)	27.125 ekor
		Jumlah kerbau (ekor)	509 ekor
		Jumlah domba (ekor)	303 ekor
		Produksi daging ruminansia besar	119,6 ton
		Lembaga ekonomi mikro	6 unit
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	305
		Terpenuhi sarana prasarana pertanian	27,00%



		Pencegahan penularan penyakit ternak	26.000 dosis
		fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	2 unit Pasar Hewan
		Ikan Laut (ton)	32.400 Ton
		Ikan Perairan Umum (ton)	760 Ton
		Ikan Kolam (ton)	300 Ton
8.	Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	1 perda
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	2 kali
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus
		Kerusakan lingkungan	0 kasus
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	2 kali
9.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	1 kawasan
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	20%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dokumen
		Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	93 desa/kelurahan (100%)
		Kapasitas Aparatur Desa	70%
		Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	30%
		Kawasan Kota Mandiri Terpadu	1 kawasan
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT			
1.	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	17
		Jumlah Puskesmas Pembantu	64
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%
		Angka Usia Harapan Hidup	71,61
2.	Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	39
		Jumlah Bidan	179
		Jumlah Perawat	181
		Jumlah Dokter per Puskesmas	1 dokter
		Rasio penduduk dengan Bidan	1 : 964
		Rasio penduduk dengan Perawat	1 : 1.185
3.	Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	72,6
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	85%
4.	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	78%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	50 % dari sasaran 5 %
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	50 % dari sasaran 70 %
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68%
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%
		Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	95%
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	95%
		Cakupan kunjungan bayi	89%
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	85%
		Cakupan pelayanan nifas	80%
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70%
		Cakupan desa siaga aktif	45%
		cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30%
		RTS-Miskin	5.263 RT miskin
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	20,30%



		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	160
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	25,04
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	36
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	20
		Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	18
		advokasi perlindungan perempuan dan anak	1
MISI VI : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT			
1.	Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%
		Persentase konflik lahan masyarakat	10%
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali sosialisasi
2.	Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan
MISI VII : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI, PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN BUDAYA			
1.	Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	1 sistem informasi
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4 lokasi
		Pengamanan Kawasan Konservasi	1 paket
		Jelasnya zonasi	1 Perda tentang RTRW
		Ketaatan terhadap RTRW	70%
		Luas wilayah produktif (Ribu Ha)	33.698,26
		Luas wilayah industry (Ribu Ha)	110
		Luas wilayah banjir (Ribu Ha)	11.229,57
Luas wilayah perkotaan (Ribu Ha)	1.325		
2.	Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 kegiatan
3.	Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	1 paket reboisasi
		Masyarakat peduli lingkungan	40%
		Pelanggar hukum	0%
MISI VIII : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS			
1.	Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah
2.	Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama
3.	Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 20%
		Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	62
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	6
		Event seni dan budaya (event)	5



4.	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	29 Organisasi masyarakat
		Jumlah organisasi pemuda	13 unit
		Jumlah kegiatan kepemudaan	17 kegiatan
		Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	1 kali sosialisasi
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan
		Kegiatan pembinaan politik daerah	9 kegiatan
		Jumlah demo	1
		Jumlah LSM	9 LSM
6.	Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jenis dan jumlah Kegiatan	4 jenis bantuan
		Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	150 KK
		Jumlah lansia yang dilayani	45 orang
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	5 orang
		menurunnya angka anak terlantar pertahun	turun 10% dari tahun 2012
		para penyandang cacat di seluruh kecamatan	turun 10% dari total penyandang cacat 2012
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	3 orang
		Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	2 orang
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	turun 10% dari total penyandang 2012
Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	15 orang		
MISI IX : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DISETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLET UNTUK BERPRESTASI			
1.	Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	40%
		Lapangan olahraga	8 unit
		Jumlah Sarana Olahraga	12
2.	Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	10 atlit
		Jumlah kegiatan olahraga	14 kegiatan
		Jumlah organisasi olahraga	13 unit
		Jumlah Club Olahraga	100
3.	Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	24 juta rupiah
4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Meningkat 20% dari sasaran 50%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2013

LAKIP disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat.



B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85 %	Sangat berhasil
2	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2013 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :



**MISI 1 : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN**

Untuk mencapai Misi 1 “**Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum Secara Merata dan Berkeadilan**” pada tahun 2013 telah dilaksanakan program utama yaitu : perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke provinsi, perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa, penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat.

Seluruh program/sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1. Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	Panjang Jalan Kabupaten	966,55 Km	976,55 Km	101,03
	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44,70%	31,46%	70,38
	Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	81,27%	64,52%	79,39
	Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	12 mobil pickup;9 truk PS; 1 Kapal ro-ro	9 mobil pickup;9 truk PS; 1 Kapal ro-ro	mobil pickup : 75%; truk PS : 100%; Kapal ro-ro : 100%
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	86.600 orang	111.558 orang	128,82
	Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	3 unit	2 unit	66,67



		Jumlah angkutan darat	10.565 unit	15.247 unit	144,32
		Pemasangan rambu-rambu	135 unit	161 unit	119,26
		Jalan desa dilalui roda empat	207,80 KM	210,43 Km	101,27
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	107 m/kendaraan	107 m/kendaraan	100
		Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	615,28 Km	605,28 Km	98,38
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50 M	165 M	330,00
		Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	43,75%	3,00%	6,86
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	17%	8,24%	48,47
		Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	19%	6,35%	33,42
2.	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540	980	181,47
		Peningkatan rasio elektrifikasi	70%	73%	104,29



	merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	30,00%	15,75%	52,50
3.	Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	75,00%	65,00%	86,67
		Luas irigasi dalam kondisi baik	75,00%	65,00%	86,67
		Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Pembangunan Tanggul : 59.502 M ¹ ; rehab Irigasi : 42.984 M ¹ ; Pintu air : 5 unit; OP :352.001 M	Pembangunan Tanggul : 125.080 M ¹ ; rehab Irigasi : 42.984 M ¹ ; Pintu air : 4 unit; OP :352.000 M	Pembangunan Tanggul : 210%; rehab Irigasi : 100%; Pintu air : 80%; OP :60%
4.	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Transportasi / komunikasi dua arah yang efektif	efektif	60%	60
5.	Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540	980	181,47
		Peningkatan jaringan telekomunikasi	Kabel 3%; Seluler 90%	Kabel 3%; Seluler 90%	100




6.	Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	1 Unit	1 Unit	100
		adanya kemudahan berinvestasi	32 jenis izin	31 jenis izin	96,88
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	2 dokumen	2 dokumen	100
7.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	32,00%	37,36%	116,75
		Persentase rumah layak huni	89,60%	89,00%	99,33
		Persentase peningkatan rumah sehat	47,20%	32,24%	68,31
		Rasio pemukiman layak huni	76,83%	75,50%	98,27
		Akses sanitasi layak	47,20%	31,22%	66,15
		Persentase penanganan sampah	36,00%	40,00%	111,11
		Adanya pola kemitraan dengan Swasta	2 pengembangan perumahan	2 pengembangan perumahan	100
		Rata-rata Capaian Kinerja			

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 **“Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum Secara Merata dan Berkeadilan”** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 7 sasaran yang didukung dengan 34 Indikator Kinerja Utama.

Dari 34 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerjanya dapat dikategorikan sangat berhasil atau sebesar 101,12 %. Pencapaian paling rendah terdapat pada indikator revitalisasi sungai dan transportasi sungai dan laut yang hanya mencapai 3 % dari target yang ditetapkan sebesar 43,75 % atau terealisasi sebesar 6 %. Indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor menjadi indikator yang paling tinggi capaiannya, yaitu terealisasi sebesar 330 %.



Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur harus lebih bekerja keras dalam upaya pencapaian misi pertama ini karena masih ada 5 indikator yang mendapatkan predikat kurang atau capaiannya kurang dari 55 %, yaitu : revitalisasi sungai dan transportasi sungai dan laut, persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut, meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut, peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih, dan transportasi / komunikasi dua arah yang efektif.

	<p>MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SDM YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI</p>
---	--

Untuk mendukung Misi 2 telah dilakukan sasaran utama yaitu peningkatan kualitas pendidikan (Perda pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik) serta tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1.	Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	Angka Rata-rata lama sekolah	7,16 Tahun	6,30 Tahun	87,99
		Angka melek huruf	93,90%	97,07%	103,38
		APK SD/Sederajat	113,98%	110,00%	96,51
		APK SMP/Sederajat	105,10%	104,70%	99,62
		APK SMA/Sederajat	76%	65%	85,53
		Meningkatnya APK PAUD	46,79%	44,97%	96,11
		Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Sederajat	94,60%	97,06%	102,60

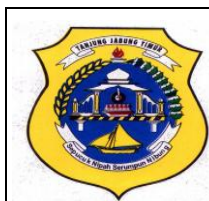


	APM SMP/Sederajat	62,78%	78,74%	127,45
	APM SMA/Sederajat	62,78%	58,92%	93,85
	Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	96,28	97,06	100,81
	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	1 : 151	1 : 117	129,06
	Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	1 : 14	1 : 16	87,50
	Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	208	251	120,67
	Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	82,76	65	78,54
	Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	229 unit	307 unit	134,06
	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	1 : 32,6	1 : 38,4	84,90
	Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	1 : 12	1 : 11	109,00
	Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	32	40	125,00



		Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% s/d 2016)	40,00%	100,00%	250,00
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	1 perda	1 perda	100,00
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/sede rajat	99,90%	99,90%	100,00
		Berdirinya perguruan tinggi	1 Perguruan Tinggi	1 Perguruan Tinggi	100,00
		Jumlah perpustakaan (unit)	2	1	50,00
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.214 orang	7.920 orang	652,39
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	31.527	25.583	81,15
		Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	45 siswa SDLB	48 siswa SDLB	106,67
2.	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	1 unit	1 unit	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					126,03

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 2 sasaran dan 27 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 126,03 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 85 %. Akan tetapi terdapat 1 indikator yang mendapat kategori kurang, yaitu jumlah perpustakaan yang hanya mencapai 50 % dari target yang ditetapkan.



MISI 3 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL.

Untuk mencapai Misi 3 “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel Dengan Penempatan SDM Profesional**” didukung dengan 7 (tujuh) sasaran dan 26 indikator kinerja yaitu :

- 1) Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
- 2) Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis *e-budget* dan *e-audit*
- 3) Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan
- 4) Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.
- 5) Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 6) Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji)
- 7) Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	69,00%	60,00%	86,96
	Jumlah PNS Daerah	4.820	4.562	94,65
	Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	93,00%	99,00%	106,45




		Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas intern	65%	50%	76,92
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,8/10.000 penduduk	3,7/10.000 penduduk	77,08
2.	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran	100,00
3.	Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kelurahan (100%)	93 desa/kelurahan (100%)	100,00
		Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan meningkat	5 jenis pelayanan	5 jenis pelayanan	100,00
4.	Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya Prioritas Calon CPNS	40%	40%	100,00
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 kali ujian kompetensi	1 kali ujian kompetensi	100,00
		CPNS yang bebas KKN	100%	100%	100,00
5.	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	38,1 Milyar	38,17 Milyar	100,00
6.	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Insentif Pegawai SARA meningkat	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	100,00
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	100,00



7.	Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	1 perda	1 perda	100,00
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP	31 SOP	100,00
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Meningkat 24,89%	26%	104,46
		Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terealisasi di 11 kecamatan	Terealisasi di 11 kecamatan	100,00
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	90%	78,69%	87,43
		Rasio pasangan berakate nikah	55%	7,75	14,09
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	100%	49,81%	49,81
		Laju pertumbuhan penduduk	0,67%	0,66%	101,52
		Pengembangan sistem jaringan e-government	7 MBPS	6 MBPS	85,71
		Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	1 website	1 website	100,00
		Sistem informasi daerah berbasis website	1 website	1 website	100,00
		Pelayanan publik bebas dari KKN	100%	100%	100,00
		Rata-rata Capaian Kinerja			



Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 7 sasaran dengan 26 indikator yang mendukung misi ketiga dapat dinyatakan sangat berhasil karena rata-rata capaian kinerja sebesar 91,73 %. Hanya ada 1 indikator yang masuk dalam kategori kurang karena hanya mencapai 49,81 % dari target yang ditetapkan, yaitu kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk.

	<p>MISI 4 : <i>MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA LAINNYA</i></p>
---	---

Untuk mencapai Misi 4 “***Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, Pariwisata dan Sektor Jasa Lainnya***” pada tahun 2013 telah dilaksanakan 9 (sembilan) sasaran yaitu :

- 1) Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.
- 2) Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.
- 3) Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah.
- 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- 5) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
- 6) Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi
- 7) Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga
- 8) Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal



9) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1.	Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	32 jenis perizinan	31 jenis perizinan	96,88
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	US\$ 16.302	US\$ 96.675,5	593,03
2.	Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	Nilai Ekspor (US\$)	87,67 Juta	81,86 juta	93,37
		Nilai Impor (US\$)	17,35 Juta	16,24 juta	93,60
		Laju inflasi	4,10%	7,09%	172,93
		PDRB atas harga berlaku	IDR 13.016.251,56 Juta	IDR 13.566.681,05 Juta	104,23
		Pertumbuhan PDRB	6,37	6,37	100,00
		PDRB per kapita (Rp.juta)	13,40	13,87	103,51
		Jenis dan jumlah bank	7	7	100,00
		Jumlah Penduduk (jiwa)	214.517	212.918	100,75
		Jumlah Sentra industri kecil	10 unit	10 unit	100,00
3.	Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat	Diprogramkan	0,00
		Kantaya LKPM	Meningkat	Diprogramkan	0,00



4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Tingkat kemiskinan	8,75	12,5	42,86
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	91,75	87,5	95,37
		Lumbung pangan	3	3	100,00
		desa ketahanan pangan	14 desa mandiri pangan	14 desa mandiri pangan	100,00
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	93 Gapoktan	93 Gapoktan	100,00
		Jumlah Desa Rawan Pangan	28 Desa	14 Desa	200,00
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	60	76,7	127,83
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	113	100,08	88,57
		Jumlah UKM	352 unit	1.441 unit	409,38
		Jumlah/UKM yang berperan	352 unit	1.441 unit	409,38
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	20 orang/unit	11 orang/unit	55,00
		UKM Unggulan	35 UKM	12 UKM	34,29
		Jumlah koperasi handal	272 koperasi	287 koperasi	105,51
		Persentase koperasi aktif	36,40%	40,42%	111,04
		Produk Unggulan	14 produk	10 produk	71,43
5.	Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	Jumlah TK yang terserap	1.240	831	67,00
		UMR	Rp. 1.200.000	Rp. 1.300.000	108,33
		Jumlah Pelatihan	6 kali	3 kali	50,00
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	15 perusahaan	35 perusahaan	233,33
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	97,50%	69,96%	71,76
		Angka kesempatan kerja	102.094 orang	104.901 orang	102,75



		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	45,20%	45,00%	99,56
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11,30%	11,30%	100,00
		Partisipasi angkatan kerja wanita	39,55%	33,81%	85,49
6.	Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	1 biro	1 biro	100,00
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	50%	Diprogramkan	0,00
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	10%	Diprogramkan	0,00
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkat 15 %	60,00
		Kunjungan wisata (orang)	12.500	13.831	110,65
		Sarana wisata (hotel & restoran)	6 + 272	6 + 272	100,00
		Objek Wisata	10	6	60,00
7.		Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Potensi Lahan	56.496 Ha	39.303 Ha
	Luas lahan pertanian tanaman pangan		31.851 Ha	27.658 Ha	86,84
	Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll		13.030 Ha	704,85 Ha	5,41
	Penguatan Kelompok Tani		1.168 Kelompok	1.159 kelompok	99,23
	Nilai Tukar Petani (%)		97,72%	97,10%	99,37
	Produktivitas Padi		36,5 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	98,71



		Produktivitas kedelai	13,7 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	94,16
		Produktivitas karet	0,30 ton/ha	0,76 ton/ha	253,33
		Produktivitas kelapa sawit	2,49 ton/ha	2,14 ton/ha	85,94
		Produktivitas kopi	0,54 ton/ha	0,47 ton/ha	87,04
		Produksi Padi	112.828 ton	104.433 ton	92,56
		Produksi Jagung	5.647 ton	1.636 ton	28,97
		Jumlah Sapi (ekor)	14.300 ekor	15.377 ekor	107,53
		Jumlah Kambing (ekor)	27.125 ekor	34.743 ekor	128,08
		Jumlah kerbau (ekor)	509 ekor	142 ekor	27,90
		Jumlah domba (ekor)	303 ekor	143 ekor	47,19
		Produksi daging ruminansia besar	119,6 ton	142 ton	118,73
		Lembaga ekonomi mikro	6 unit	6 unit	100,00
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	305	305	100,00
		Terpenuhi sarana prasarana pertanian	27,00%	48,35	179,07
		Pencegahan penularan penyakit ternak	26.000 dosis	26.805 dosis	103,10
		fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	2 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	100,00
		Ikan Laut (ton)	32.400 Ton	25.430 Ton	78,49
		Ikan Perairan Umum (ton)	760 Ton	685 Ton	99,14
		Ikan Kolam (ton)	300 Ton	300 Ton	100,00
8.	Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	1 perda	Diprogramkan	0,00
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	2 kali	2 kali	100,00
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus	0 kasus	100,00
		Kerusakan lingkungan	0 kasus	0 kasus	100,00



		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus	0 kasus	100,00
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	2 kali	2 kali	100,00
9.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	1 kawasan	1 kawasan	100,00
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	20%	20%	100,00
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dokumen	18 dokumen	360,00
		Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	93 desa/kelurahan (100%)	93 desa/kelurahan (100%)	100,00
		Kapasitas Aparatur Desa	70%	24,66%	35,23
		Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	30%	30%	100,00
		Kawasan Kota Mandiri Terpadu	1 kawasan	1 kawasan	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					107,58

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 9 sasaran dengan 82 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan sangat berhasil karena rata-rata capaian kinerja sebesar 107,85 %. Akan tetapi masih terdapat 13 indikator atau 15,85 % dari total indikator yang masih termasuk kategori kurang karena nilai capaiannya yang kurang dari 55 %.



**MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT**

Untuk mencapai Misi 5 **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”** pada tahun 2013 telah dilaksanakan 4 (empat) sasaran utama yaitu:

- 1) Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas
- 2) Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat
- 3) Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- 4) Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1 . Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	17	17	100,00
	Jumlah Puskesmas Pembantu	64	58	90,63
	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%	95,24%	97,18
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%	96%	101,06
	Angka Usia Harapan Hidup	71,61	71,42	99,73



2	Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	39	33	84,62
		Jumlah Bidan	179	255	143,26
		Jumlah Perawat	181	273	150,83
		Jumlah Dokter per Puskesmas	1 dokter	1 dokter	100,00
		Rasio penduduk dengan Bidan	1 : 964	1 : 867	111,19
		Rasio penduduk dengan Perawat	1 : 1.185	1 : 810	146,30
3	Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	72,6	72,52	99,89
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	85%	100%	117,65
4	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun (10%)	7,70%	77,00
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	78%	78%	100,00
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	50 % dari sasaran 5 % (12%)	8,70%	72,50
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	50 % dari sasaran 70 % (81%)	82%	101,23
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak	2 anak	100,00
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68,00%	71,07%	104,51



	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80,00%	90,37%	112,96
	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	95,00%	89,20%	93,89
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	95,00%	100,00%	105,26
	Cakupan kunjungan bayi	89,00%	96,11%	107,99
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	85,00%	89,44%	105,22
	Cakupan pelayanan nifas	80,00%	92,06%	115,08
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70,00%	66,21%	94,59
	Cakupan desa siaga aktif	45,00%	44,09%	97,98
	cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30,00%	15,00%	50,00
	RTS-Miskin	5.263 RT miskin	6.553 RT miskin	80,31
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	20,30%	20,12%	100,89



	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	160	127	125,98
	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	25,04	22,69	110,36
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	36	24,25	148,45
	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	20	21,9	91,32
	Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	18%	0,95%	1894,74
	Advokasi perlindungan perempuan dan anak	1	1	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja				154,47

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 4 sasaran dengan 36 indikator yang mendukung misi kelima dapat dinyatakan sangat berhasil karena rata-rata capaian kinerja sebesar 154,47 %. Hanya ada 1 indikator yang masuk dalam kategori kurang karena hanya mencapai 50 % dari target yang ditetapkan, yaitu cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%.

	<p>MISI 6 : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT</p>
--	--

Untuk mencapai Misi 6 “**Memfasilitasi Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat**” pada tahun 2013 telah dilaksanakan 2 (dua) sasaran utama yaitu :

- 1) Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- 2) Melindungi fasilitas umum dan aset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.



Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1.	Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%	100%	100,00
		Persentase konflik lahan masyarakat	10%	10%	100,00
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali sosialisasi	3 kali sosialisasi	100,00
2.	Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan	1 aturan	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					100,00

Dari seluruh sasaran dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016, seluruh sasaran yang ditargetkan dapat dilaksanakan dan mencapai target yang diinginkan atau mencapai sebesar 100 %.



**MISI 7 : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI,
PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN
BUDAYA TRADISIONAL.**

Untuk mencapai Misi 7 “*Meningkatkan Penataan Zonasi dan Perlindungan Terhadap Kawasan Konservasi, Peninggalan Budaya Situs dan Pengembangan Budaya Tradisional*” pada tahun 2013 telah dilaksanakan 3 (tiga) sasaran utama yaitu :

- 1) Terciptanya kesadaran para *stakeholder* tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
- 2) Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.
- 3) Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1) Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	1 sistem informasi	1 sistem informasi	100,00
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4 lokasi	2 lokasi	50,00
	Pengamanan Kawasan Konservasi	1 paket	1 paket	100,00
	Jelasnya zonasi	1 Perda tentang RTRW	1 Perda tentang RTRW	100,00
	Ketaatan terhadap RTRW	70%	75%	107,14



		Luas wilayah produktif (Ribu Ha)	33.698,26	89.682	266,13
		Luas wilayah industry (Ribu Ha)	110	1.120	1018,18
		Luas wilayah banjir (Ribu Ha)	11.229,57	6.565,48	171,04
		Luas wilayah perkotaan (Ribu Ha)	1.325	547,49	41,32
2	Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
3	Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	1 paket reboisasi	1 paket reboisasi	100,00
		Masyarakat peduli lingkungan	40%	60%	150,00
		Pelanggar hukum	0%	10%	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja					177,22

Misi ketujuh dari RPJMD ini terdiri dari 3 sasaran dan 13 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 177,22 % atau berkategori sangat berhasil berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan karena memiliki nilai rata-rata diatas 85 %. Akan tetapi terdapat 3 indikator yang mendapat kateregori kurang, yaitu benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, luas wilayah perkotaan (ribu ha), dan pelanggar hukum.



MISI 8 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI

Untuk mencapai Misi 8 “*Mewujudkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya yang Dinamis serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi*” pada tahun 2013 telah dilaksanakan 6 (enam) sasaran utama yaitu :

- 1) Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.
- 2) Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah
- 3) Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku.
- 4) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.
- 6) Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1.	Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100,00
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100,00
2.	Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama	100,00



3.	Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 20%	1 kajian (20%)	100,00
		Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	62	40	64,52
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	6	6	100,00
		Event seni dan budaya (event)	5	4	80,00
4.	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	29 Organisasi masyarakat	33 Organisasi masyarakat	113,79
		Jumlah organisasi pemuda	13	13	100,00
		Jumlah kegiatan kepemudaan	17 kegiatan	9 kegiatan	52,94
		Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat	Meningkat	100,00
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	1 kali sosialisasi	11 kali sosialisasi	1100,00
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan	4 kegiatan	133,33
		Kegiatan pembinaan politik daerah	9 kegiatan	6 kegiatan	66,67
		Jumlah demo	1	1	100,00
		Jumlah LSM	9 LSM	37 LSM	411,11
		Jenis dan jumlah Kegiatan	4 jenis bantuan	4 jenis bantuan	100,00
6.	Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	150 KK	100 KK	66,67



sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah lansia yang dilayani	45 orang	53 orang	117,78
	Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	5 orang	15 orang	300,00
	menurunnya angka anak terlantar pertahun	turun 10% dari tahun 2012	turun 10%	100,00
	para penyandang cacat di seluruh kecamatan	turun 10% dari total penyandang cacat 2012	turun 10%	100,00
	Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	3 orang	4 orang	133,33
	Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	2 orang	4 orang	200,00
	Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	turun 10% dari total penyandang 2012	turun 10%	100,00
	Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	15 orang	20 orang	133,33
Rata-rata Capaian Kinerja				160,52

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 6 sasaran dengan 26 indikator yang mendukung misi kedelapan dapat dinyatakan sangat berhasil karena rata-rata capaian kinerja sebesar 160,52 %. Hanya ada 1 indikator yang masuk dalam kategori kurang karena hanya mencapai 52,94 % dari target yang ditetapkan, yaitu jumlah kegiatan kepemudaan.



MISI 9 : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DI SETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLIT UNTUK BERPRESTASI

Untuk mencapai Misi 9 “*Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Setiap Kecamatan dan Pembinaan Atlit Untuk Berprestasi*” pada tahun 2013 telah dilaksanakan 4 (empat) program utama yaitu :

- Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.
- Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan
- Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.
- Pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori’ah tingkat provinsi dan tingkat nasional

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
1.	Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	40%	73%	182,50
		Lapangan olahraga	8 unit	4 unit	50,00
		Jumlah Sarana Olahraga	12 unit	5 unit	41,67
2.	Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	10 atlit	4 atlit	40,00
		Jumlah kegiatan olahraga	14 kegiatan	9 kegiatan	64,29
		Jumlah organisasi olahraga	13 unit	13 unit	100,00
		Jumlah Club Olahraga	100	96	96,00
3.	Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi & mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	24 juta rupiah	25,9 juta rupiah	107,92



4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Meningkat 20% dari sasaran 50%	Meningkat 20%	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					86,93

Misi kesembilan dari RPJMD 2011-2016 ini terdiri dari 4 sasaran dan 9 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,93 %. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi sembilan ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 85 %. Akan tetapi terdapat 3 indikator yang mendapat kateregori kurang karena pencapaiannya kurang dari 55 %, yaitu lapangan olahraga, jumlah sarana olahraga, dan atlit berprestasi terbina sejak usia dini.

C. KINERJA KEUANGAN

1. PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar Rp. 883.020.150.665,58 dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 920.050.845.451,31 atau terealisasi sebesar 104,19 %, dapat jelas sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	27.697.198.667,83	30.636.616.753,46	110,61
2	Pendapatan Dana Perimbangan	779.501.879.845,90	809.458.361.816,00	103,84
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	75.821.072.151,85	79.955.866.881,85	105,45
	Total	883.020.150.665,58	920.050.845.451,31	104,19

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur



Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	5.426.500.000,00	8.399.170.234,00	154,78
2	Retribusi Daerah	3.751.105.400,00	3.234.577.186,17	86,23
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	4.498.606.053,06	4.460.373.993,06	99,15
4	Lain – Lain PAD yang sah	14.020.987.214,77	14.542.495.340,23	103,72
Jumlah		27.697.198.667,83	30.636.616.753,46	110,61

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 melebihi penerimaan yang ditargetkan. Over target Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini disumbang oleh semua sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah kecuali dari retribusi (retribusi jasa usaha sebesar 75,58 % dan retribusi perizinan tertentu sebesar 42,05 %) dan hasil pengelolaan kekayaan (bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN/PT. Telkom sebesar 33,95 % dan penerimaan jasa giro sebesar 73,29 %). Realisasi terbesar terjadi pada pajak daerah yaitu sebesar 154,78%, kemudian dari lain-lain PAD sebesar 103,72 %. Kenaikan realisasi pajak daerah secara signifikan ini dipengaruhi oleh berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, khususnya dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 2.463,35 %.



2. Pendapatan Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	341.049.327.845,90	371.005.809.816,00	108,78
2	Dana Alokasi Umum	430.383.112.000,00	430.383.112.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	8.069.440.000,00	8.069.440.000,00	100,00
J u m l a h		779.501.879.845,90	809.458.361.816,00	103,84

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi dana perimbangan selama tahun 2013 melebihi penerimaan yang ditargetkan. Over target pendapatan daerah pada tahun ini disumbang oleh bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 108,78 %, sedangkan realisasi dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terealisasi sesuai target penerimaan yaitu 100 %.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah	0,00	0,00	0,00
2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	20.629.706.274,00	24.954.532.004,00	120,96
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DPDF)	44.492.530.000,00	44.302.499.000,00	99,57
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	10.698.835.877,85	10.698.835.877,85	100,00
J u m l a h		75.821.072.151,85	79.955.866.881,85	105,45

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur



2. BELANJA DAERAH

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	355.535.450.029,87	345.969.981.262,00	97,31
2	Belanja Langsung	638.809.632.640,85	596.004.495.626,00	93,30
	Total	994.345.082.670,72	941.974.476.888,00	94,73

Sumber Data : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada tahun anggaran 2013 belanja tidak langsung hanya sebesar 35,76 % dari total belanja, hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2011-2016 bahwa belanja tidak langsung di kabupaten Tanjung Jabung Timur dibatasi maksimal 40 % dari total belanja.

Total realisasi belanja sebesar Rp. 941.974.476.888,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 994.345.082.670,72 atau terealisasi sebesar 94,73 %, dimana belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 345.969.981.262,00 atau 97,31 % dan belanja langsung sebesar Rp. 596.004.495.626,00 atau 93,30 %.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.



NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	Penerimaan Pembiayaan		
	- SiLPA Tahun Lalu	122.574.932.005,14	122.574.932.005,14
	- Pencairan Dana Cadangan		
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	- Penerimaan Pinjaman Daerah		
	- Penerimaan Piutang Daerah		
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	- Pembentukan Dana Cadangan		
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.250.000.000,00	11.250.000.000,00
	-Badan Usaha Kelompok/Anggota Masyarakat		
	- Pembayaran Pokok Utang		
	- Pemberian Pinjaman Daerah		
3	Pembiayaan Netto	111.324.932.005,14	111.324.932.005,14

Sumber : DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2013, anggaran SILPA ditargetkan Rp. 122.574.932.005,14 dan terealisasi sebesar 100%. Sedangkan pada sisi realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2013 terealisasi sebesar Rp.11.250.000.000,00 atau sebesar 100 % dari target pembentukan dana cadangan.



BAB IV

PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

A. KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011–2016, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2013 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2013. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:



1. Partisipasi *stakeholders*, antara lain : Perangkat Daerah (Dinas, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2016**

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI I : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN				
1. Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	Panjang Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan kabupaten	Primer	Dinas PU
	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Primer	Dinas PU
	Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	Persentase jalan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	Primer	Dinas PU
	Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	Primer	Dishubkominfo
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah orang yang menggunakan jasa angkutan umum	Primer	Dishubkominfo
	Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	cukup jelas	Primer	Dishubkominfo
	Jumlah angkutan darat	Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Primer	Dishubkominfo
	Pemasangan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu yang dipasang pada tahun bersangkutan	Primer	Dishubkominfo
	Jalan desa dilalui roda empat	Jumlah jalan pedesaan yang dapat dilalui kendaraan roda empat	Primer	Dinas PU
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan sehingga dapat diketahui tingkat kepadatan kendaraan	Primer	Dinas PU dan Dishubkominfo
	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	Panjang jalan yang menjadi jalan penghubung ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	Primer	Dinas PU
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Panjang turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Primer	Dinas PU
	Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	Persentase revitalisasi Sungai	Primer	Dishubkominfo
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	cukup jelas	Primer
	Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	Jumlah pengguna moda transportasi	Primer	Dishubkominfo

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
2.	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di pedesaan	Jumlah PLTS di pedesaan	Primer	Dinas ESDM
		Peningkatan rasio elektrifikasi	Perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan total penduduk	Primer	Dinas ESDM
		Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	Persentase jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih	Sekunder	Dinas PU
3.	Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	Persentase jumlah insfratraktur irigasi terhadap irigasi yang ada	Primer	Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
		Luas irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas irigasi yang baik terhadap irigasi yang ada	Primer	Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
		Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	cukup jelas	Primer	Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun, DKP
4.	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Transportasi dua arah yang efektif	cukup jelas	Primer	Dinas PU dan Dishubkominfo
5.	Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di pedesaan	Jumlah PLTS di pedesaan	Primer	Dinas ESDM
		Peningkatan jaringan telekomunikasi	Persentase penduduk yang mempunyai telepon tetap dan Telepon seluler	Sekunder	Dishubkominfo
6.	Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	Jumlah instansi perizinan terpadu	Primer	KPPT
		adanya kemudahan berinvestasi	Kemudahan berinvestasi melalui jumlah jenis perizinan yang ada	Primer	KPPT
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	Tersedianya dokumen pendukung	Primer	Bappeda
7.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persentase RTH per satuan luas wilayah	Primer	Dinas PU dan Dinas Tata Kota
		Persentase rumah layak huni	Persentase rumah yang layak huni terhadap total rumah	Primer	Dinas PU
		Persentase peningkatan rumah sehat	Persentase rumah yang sehat terhadap total rumah	Primer	Dinas PU
		Rasio pemukiman layak huni	Persentase pemukiman yang layak huni terhadap total pemukiman yang ada	Primer	Dinas PU
		Akses sanitasi layak	Persentase rumah yang bersanitasi layak	Sekunder	Dinas PU
		Persentase penanganan sampah	Persentase penanganan sampah yang dapat ditangani	Primer	Dinas Tata Kota

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Adanya pola kemitraan dengan Swasta	Jumlah kemitraan swasta	Sekunder	Dinas PU
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI (PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS)					
1.	Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	Angka Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Angka melek huruf	Persentase jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang bisa menulis terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun keatas	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APK SD/Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SD/ sederajat	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APK SMP/Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SMP/ sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SMP/ sederajat	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APK SMA/Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SMA/ sederajat	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya APM PAUD	Persentase jumlah penduduk usia dibawah 7 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APM SMP/Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APM SMA/Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 16-18 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	Jumlah sekolah SD sederajat dibagi jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 7-12 tahun dikali 10.000	Sekunder	Dinas Pendidikan

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	Jumlah guru SD sederajat dibagi jumlah murid SD sederajat dikali 10.000	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	Jumlah sekolah tingkat PAUD	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	Jumlah sekolah SMP sederajat dibagi jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 13-15 tahun dikali 10.000	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	Jumlah guru SMP sederajat dibagi jumlah murid SMP sederajat dikali 10.000	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	Jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	Persentase tingkat kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil	Primer	Dinas Pendidikan
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	Perda Pendidikan gratis berkualitas	Primer	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/ sederajat	Persentase kuliatas lulusan SMU/ sederajat	Primer	Dinas Pendidikan
		Berdirinya perguruan tinggi	Cukup jelas	Primer	Dinas Pendidikan
		Jumlah perpustakaan (unit)	Cukup jelas	Primer	Kantor Perpustakaan dan Arip
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Cukup jelas	Primer	Kantor Perpustakaan dan Arip
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	Jumlah unit buku di perpustakaan	Primer	Kantor Perpustakaan dan Arip
		Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	Persentase Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	Primer	Dinas Pendidikan dan Dinsosnakertrans
2.	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	Terselenggaranya pendidikan di BLK	Primer	Dinsosnakertrans dan Dinas Pendidikan
MISI III : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL					
1.	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	Persentase pejabat yang memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya dibandingkan dengan total jabatan yang ada	Primer	Sekda, BKD
		Jumlah PNS Daerah	cukup jelas	Primer	BKD

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Primer	Inspektorat, Sekda
		Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas intern	Persentase jumlah aparatur pengawas intern	Primer	Inspektorat
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	cukup jelas	Primer	Kantor Satpol PP
2.	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Pelaksanaan sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Primer	DPKAD
3.	Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	Terlaksananya penataan wilayah	Primer	Sekda, BPMPD/K, Bappeda
		Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	Pelayanan publik di kecamatan	Primer	Sekda, BPMPDK, kecamatan
4.	Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya Prioritas Calon CPNS	Jumlah Proritas calon CPNS sesuai kebutuhan	Primer	BKD, SKPD Terkait
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	Penempatan CPNS yang sesuai dengan kebutuhan		
		CPNS yang bebas KKN	Terlaksana CPNS bebas KKN	Primer	BKD, Sekda
5.	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	Cukup jelas	Primer	BKD
6.	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Insentif Pegawai SARA meningkat	Terealisasi insentif pegawai SARA meningkat	Primer	Sekda, DPKAD
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Cukup jelas	Primer	Sekda, DPKAD
7.	Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	adanya Perda	Primer	Sekda, DPKAD
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	Optimalnya fungsi KPPT	Primer	KPPT
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Persentase peningkatan PAD	Primer	KPPT, DPKAD
		Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	e-KTP terlaksana dengan optimal	Primer	Dinas Dukcapil
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KTP	Primer	Dinas Dukcapil
		Rasio pasangan berakte nikah	Persentase pasangan yang memiliki akte nikah	Primer	Dinas Dukcapil
		Kepemilikan akte kelahiran	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	Primer	Dinas Dukcapil
		Laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk per tahun	Primer	BPPKB, Dinas Dukcapil, SKPD terkait

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Pengembangan sistem jaringan e-government	Kapasitas Jaringan	Primer	Bappeda, KPDA PD
		Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	Terintegrasinya sistem aplikasi	Primer	Bappeda, KPDA PD
		Sistem informasi daerah berbasis website	Layanan website sebagai informasi	Primer	Semua SKPD
		Pelayanan publik bebas dari KKN	Terlaksananya pelayanan publik bebas KKN	Primer	Inspektorat, Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, KPPT, Dukcapil
MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA LAINNYA.					
1.	Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	jenis perizinan	Primer	KPPT
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	cukup jelas	Sekunder	KPPT, Bappeda
2.	Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	Nilai Ekspor (US\$)	cukup jelas	Sekunder	Disperindag
		Nilai Impor (US\$)	cukup jelas	Sekunder	Disperindag
		Laju inflasi	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
		PDRB atas harga berlaku	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
		Pertumbuhan PDRB	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
		PDRB per kapita (Rp.juta)	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
		Jenis dan jumlah bank	cukup jelas	Sekunder	Sekda, BPS
		Jumlah Penduduk (jiwa)	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
		Jumlah Sentra industri kecil	cukup jelas	Sekunder	Disperindag
3.	Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	cukup jelas	Sekunder	Sekretariat Daerah
		Kantaya LKPM	cukup jelas	Sekunder	Sekretariat Daerah
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Sekunder	Bappeda, BPS, SKPD terkait
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS, SKPD terkait
		Lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
		desa ketahanan pangan	Jumlah desa ketahanan pangan	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
		Jumlah Desa Rawan Pangan	cukup jelas	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	cukup jelas	Primer	Kantor Ketahanan Pangan

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	cukup jelas	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
		Jumlah UKM	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Jumlah/UKM yang berperan	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
		UKM Unggulan	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
		Jumlah koperasi handal	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
		Persentase koperasi aktif	Persentase Jumlah koperasi yang aktif (RAT)	Primer	Dinas Koperasi UMKM
		Produk Unggulan	Jumlah Produk unggulan	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun, Dinas Peternakan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, DKP
5.	Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	Jumlah TK yang terserap	Cukup jelas	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
		UMR	Jumlah upah yang minimal diterima oleh pekerja setiap bulannya	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah Pelatihan	Jumlah pelatihan ketenagakerjaan	Primer	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	Cukup jelas	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Cukup jelas	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
		Angka kesempatan kerja	Adanya lapangan pekerjaan	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Cukup jelas	Sekunder	BPPKB
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Cukup jelas	Sekunder	BPPKB
		Partisipasi angkatan kerja wanita	Cukup jelas	Sekunder	BPPKB
6.	Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjab. Timur	Jumlah birowisata yang menyediakan paket wisata di Tanjung Jabung Timur	Sekunder	Dinas Budparpora
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	Sinergis sarana modal transportasi untuk layanan kepariwisataan	Sekunder	Dinas Budparpora
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	Wisata bahari, wisata budaya dan religi, Wisata Alam	Sekunder	Dinas Budparpora
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Persentase peningkatan jumlah wisatawan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sekunder	Dinas Budparpora
		Kunjungan wisata (orang)	Jumlah wisatawan (orang) yang berkunjung	Sekunder	Dinas Budparpora
		Sarana wisata (hotel & restoran)	Jumlah sarana hotel dan restoran	Sekunder	Dinas Budparpora
		Objek Wisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola	Sekunder	Dinas Budparpora
7.	Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Potensi Lahan	Luas potensi lahan	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	Cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BP4K
		Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	Luas lahan yang mendapat bantuan	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BP4K

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
	Penguatan Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani	Primer	BP4K
	Nilai Tukar Petani (%)	Persentase nilai jual terhadap nilai produksi petani		Dinas Pertanian TP, Dinas Hutbun
	Produktivitas Padi	cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian TP
	Produksi kedelai	cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian TP
	Produksi karet	cukup jelas	Primer	Dinas Hutbun
	Produktivitas kelapa sawit	cukup jelas	Primer	Dinas Hutbun
	Produktivitas kopi	cukup jelas	Primer	Dinas Hutbun
	Produksi Padi	cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian TP
	Produksi Jagung	cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian TP
	Jumlah Sapi (ekor)	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Jumlah Kambing (ekor)	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Jumlah kerbau (ekor)	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Jumlah domba (ekor)	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Produksi daging ruminansia besar	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Lembaga ekonomi mikro	Jumlah lembaga ekonomi mikro	Primer	Dinas Koperasi UMKM
	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	cukup jelas	Sekunder	Dinas Perindag; Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	Jumlah sarana prasarana pertanian	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	Pencegahan penularan penyakit ternak	Penanganan penyakit ternak dengan baik	Primer	Dinas Peternakan
	fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	Pasar hewan	Primer	Dinas Peternakan
	Ikan Laut (ton)	Jumlah produksi ikan laut	Primer	DKP
	Ikan Perairan Umum (ton)	Jumlah produksi ikan perairan umum	Primer	DKP
	Ikan Kolam (ton)	Jumlah produksi ikan kolam	Primer	DKP

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
8.	Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	Adanya perda tentang pengelolaan SDA	Primer	Dinas ESDM
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	Jumlah penyuluhan tentang lingkungan	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
		Tingkat pencemaran lingkungan	Jumlah kasus pencemaran lingkungan	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
		Kerusakan lingkungan	Jumlah kerusakan lingkungan	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	Jumlah bencana alam akibat pengelolaan SDA	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	cukup jelas	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
9.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	Kawasan pusat pertumbuhan kecamatan	Primer	BPMPD/K
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Kawasan pusat pertumbuhan kecamatan	Primer	Dinas Perindag; Dinas koperasi; Dinas Budparpora
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Primer	Bappeda
		Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam proses pembangunan	Primer	BPMPD/K
		Kapasitas Aparatur Desa	Persentase kecukupan jumlah aparatur desa	Primer	BPMPD/K
		Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	Persentase perempuan dalam pembangunan desa	Primer	BPPKB
		Kawasan Kota Mandiri Terpadu	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT					
1.	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas Pembantu	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Rasio obat terhadap standar kebutuhan	Primer	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Primer	Dinas Kesehatan
		Angka Usia Harapan Hidup	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB	
2.	Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Bidan	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Perawat	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah	
		Jumlah Dokter per Puskesmas	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Rasio penduduk dengan Bidan	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Rasio penduduk dengan Perawat	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
3.	Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	Cukup Jelas	Sekunder	Dinas Kesehatan	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Primer	Dinas Kesehatan	
4.	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	Persentase PUS yang istri dibawah 20 tahun terhadap jumlah PUS	Primer	BPPKB	
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	Persentase PUS peserta KB terhadap jumlah PUS	Primer	BPPKB	
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	Persentase PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi terhadap jumlah PUS yang ber-KB	Primer	BPPKB	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	Persentase anggota Bina Keluarga Balita ber- KB	Primer	BPPKB	
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	cukup jelas	Primer	BPPKB	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Cakupan kunjungan bayi	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan nifas	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan	
			Cakupan desa siaga aktif	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
			cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
			RTS-Miskin	Jumlah RTS-Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Sekunder	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Sekunder	Dinas Kesehatan
		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
		Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
		advokasi perlindungan perempuan dan anak	Jumlah perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan	Primer	BPPKB
MISI VI : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT					
1.	Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	Jumlah penyelesaian kasus sengketa lahan secara persuasif	Primer	Sekda, BPN
		Persentase konflik lahan masyarakat	Cukup jelas	Primer	Sekda, BPN
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	Jumlah penyelesaian kasus sengketa lahan secara persuasif		
2.	Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	Peraturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	Primer	Sekda, BPN

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI VII : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI, PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN BUDAYA				
1. Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	Adanya sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	Primer	Kantor LH, Dinas hutbun, Bappeda
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Primer	Dinas Budparpora
	Pengamanan Kawasan Konservasi	Cukup jelas	Primer	Dinas Hutbun, BKSDA TNB, Polres.
	Jelasnya zonasi	Dokumen RTRW yang mengatur zonasi kawasan konservasi	Primer	Bappeda, Dinas Hutbun, Sekda, BKSDA TNB, Kantor LH
	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase peruntukan lahan terhadap RTRW	Primer	Bappeda, Dinas Hutbun, Sekda, BKSDA TNB, Kantor LH
	Luas wilayah produktif (Ribu Ha)	Cukup jelas	Primer	Bappeda
	Luas wilayah industry (Ribu Ha)	Cukup jelas	Primer	Bappeda
	Luas wilayah banjir (Ribu Ha)	Cukup jelas	Primer	Bappeda
	Luas wilayah perkotaan (Ribu Ha)	Cukup jelas	Primer	Bappeda
2. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Jumlah kegiatan kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
3. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	Keberlanjutan pelestarian hutan dan lahan	Primer	Sekda, Dinas Hutbun
	Masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi	Primer	Sekda, Dinas Hutbun
	Pelanggar hukum	Persentase pelanggaran hukum	Primer	Kantor LH, Dinas Hutbun dan DKP
MISI VIII : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS				
1. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	Jumlah korban jiwa akibat bencana yang terjadi berkurang	Primer	Dinas Sosnakertrans, Badan Kesbanglimas
	Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	Jumlah masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	Primer	Badan Kesbangpolinmas, Sekda
2. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	Ketentraman dan kerukunan umat beragama	Primer	Sekda
3. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	Cakupan kajian seni 50%	Persentase kajian seni	Sekunder	Dinas Budparpora
	Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Event seni dan budaya (event)	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
4.	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Primer	Badan Kesbangpolinmas, Sekda
		Jumlah organisasi pemuda	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah kegiatan kepemudaan	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Cukup jelas	Primer	BPPKB
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	Persentase meningkatnya iklim demokrasi	Primer	Badan Kesbangpolinmas
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Primer	Badan Kesbangpolinmas
		Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Primer	Badan Kesbangpolinmas
		Jumlah demo	Cukup jelas	Primer	Badan Kesbangpolinmas, Sekda
		Jumlah LSM	Cukup jelas	Primer	Badan Kesbangpolinmas
6.	Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jenis dan jumlah Kegiatan bantuan	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah lansia yang dilayani	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
		menurunnya angka anak terlantar pertahun	Persentase menurunnya angka anak terlantar pertahun	Primer	Dinas Sosnakertrans
		para penyandang cacat di seluruh kecamatan	Persentase para penyandang cacat di seluruh kecamatan	Primer	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
		Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans

MISI IX : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DISETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLET UNTUK BERPRESTASI

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1.	Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Lapangan Olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah Sarana Olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
2.	Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	Jumlah atlit berprestasi terbina	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah kegiatan olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah organisasi olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah Club Olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
3.	Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	Besaran anggaran yang dialokasikan	Primer	Dinas Budparpora
4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Cukup Jelas	Primer	Sekda

**PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pemerintah Kabupaten
Tahun

: Tanjung Jabung Timur
: 2013

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI I : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN			
1.	Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	Panjang Jalan Kabupaten	966,55 Km
		Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44.70%
		Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	81.27%
		Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	12 mobil pickup;9 truk PS; 1 Kapal roro
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	86.600 orang
		Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	3 unit
		Jumlah angkutan darat	10.565 unit
		Pemasangan rambu-rambu	135
		Jalan desa dilalui roda empat	207,80 KM
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	107 m/kendaraan
		Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	615, 28 KM
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50 M
		Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	43.75%
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	17%
2.	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540
		Peningkatan rasio elektrifikasi	70%
		Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	30.00%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
3.	Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	75.00%
		Luas irigasi dalam kondisi baik	75.00%
		Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Pembangunan Tanggul : 59.502 M ¹ ; rehab Irigasi : 42.984 M ¹ ; Pintu air : 5 unit; OP :352.001 M
4.	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Transportasi / komunikasi dua arah yang efektif	efektif
5.	Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di pedesaan	540
		Peningkatan jaringan telekomunikasi	Kabel 3%; Seluler 90%
6.	Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	1 Unit
		adanya kemudahan berinvestasi	32 jenis izin
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	2 dokumen
7.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	32.00%
		Persentase rumah layak huni	89.60%
		Persentase peningkatan rumah sehat	47.20%
		Rasio pemukiman layak huni	76.83%
		Akses sanitasi layak	47.20%
		Persentase penanganan sampah	36.00%
		Adanya pola kemitraan dengan Swasta	2 pengembangan perumahan
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI (PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS)			
1.	Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	Angka Rata-rata lama sekolah	7,16 Tahun
		Angka melek huruf	93.90%
		APK SD/Sederajat	113.98%
		APK SMP/Sederajat	105.10%
		APK SMA/Sederajat	76%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Meningkatnya APK PAUD	46.79%
		Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Sederajat	94.60%
		APM SMP/Sederajat	62.78%
		APM SMA/Sederajat	62.78%
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	96.28
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	1 : 151
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	1 : 14
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	208+44
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	82.76
		Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	229 unit
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	1 : 326
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	1 : 12
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	32
		Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	40.00%
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	1 perda
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/ sederajat	99.90%
		Berdirinya perguruan tinggi	1 Perguruan Tinggi
		Jumlah perpustakaan (unit)	2
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.214 orang
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	31,527
		Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	45 siswa SDLB
2.	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	1 unit
MISI III : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL			

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
1.	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	69.00%
		Jumlah PNS Daerah	4,820
		Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	93.00%
		Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas intern	65%
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,8/10.000 penduduk
2.	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran
3.	Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kelurahan (100%)
		Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	5 jenis pelayanan
4.	Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya Prioritas Calon CPNS	40%
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 kali ujian kompetensi
		CPNS yang bebas KKN	100%
5.	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	38,1 Milyar
6.	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Insentif Pegawai SARA meningkat	Rp. 600.000,00
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Rp. 600.000,00
7.	Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	1 perda
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Meningkat 24,89%
		Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terealisasi di 11 kecamatan
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	90%
		Rasio pasangan berakte nikah	55%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	100%
		Laju pertumbuhan penduduk	0.67%
		Pengembangan sistem jaringan e-government	7 MBPS
		Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	1 website
		Sistem informasi daerah berbasis website	1 website
		Pelayanan publik bebas dari KKN	100%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA LAINNYA.			
1.	Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	32 jenis perizinan
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	US\$ 16.302
2.	Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	Nilai Ekspor (US\$)	87,67 Juta
		Nilai Impor (US\$)	17,35 Juta
		Laju inflasi	4.10%
		PDRB atas harga berlaku	IDR 13.016.251,56 Juta
		Petumbuhan PDRB	6.37
		PDRB per kapita (Rp.juta)	13.40
		Jenis dan jumlah bank	7
		Jumlah Penduduk (jiwa)	214,517
		Jumlah Sentra industri kecil	10 unit
3.	Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat
		Kantaya LKPM	Meningkat
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Tingkat kemiskinan	8.75
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	91.75
		Lumbung pangan	3
		desa ketahanan pangan	14 desa mandiri pangan
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	93 Gapoktan
		Jumlah Desa Rawan Pangan	28 Desa
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	60
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	113
		Jumlah UKM	352 unit
		Jumlah/UKM yang berperan	352 unit
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	20 orang/unit
		UKM Unggulan	35 UKM
		Jumlah koperasi handal	272 koperasi
		Persentase koperasi aktif	36.40%
Produk Unggulan	14 produk		
5.	Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	Jumlah TK yang terserap	1,240
		UMR	Rp. 1.200.000
		Jumlah Pelatihan	6 kali

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	15 perusahaan
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	97.50%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Angka kesempatan kerja	102,094 orang
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	45.20%
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11.30%
		Partisipasi angkatan kerja wanita	39.55%
6.	Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	1 biro
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	50%
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	10
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkatnya kunjungan wisata 25%
		Kunjungan wisata (orang)	12,500
		Sarana wisata (hotel & restoran)	6 + 272
		Objek Wisata	10
7.	Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Potensi Lahan	56.496 Ha
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	31.851 Ha
		Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	13.030 Ha
		Penguatan Kelompok Tani	1.168 Kelompok
		Nilai Tukar Petani (%)	97.72%
		Produktivitas Padi	36,5 Kwt/ha
		Produktivitas kedelai	13,7 kwt/ha
		Produktivitas karet	0,30 ton/ha
		Produktivitas kelapa sawit	2,49 ton/ha
		Produktivitas kopi	0,54 ton/ha
		Produksi Padi	112.828 ton
		Produksi Jagung	5.647 ton
		Jumlah Sapi (ekor)	14.300 ekor
		Jumlah Kambing (ekor)	27.125 ekor
		Jumlah kerbau (ekor)	509 ekor
		Jumlah domba (ekor)	303 ekor
		Produksi daging ruminansia besar	119,6 ton
		Lembaga ekonomi mikro	6 unit
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	305

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Terpenuhi sarana prasarana pertanian	27.00%
		Pencegahan penularan penyakit ternak	26.000 dosis
		fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	2 unit Pasar Hewan

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Ikan Laut (ton)	32.400 Ton
		Ikan Perairan Umum (ton)	760 Ton
		Ikan Kolam (ton)	300 Ton
8.	Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	1 perda
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	2 kali
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus
		Kerusakan lingkungan	0 kasus
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	2 kali
		9.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	20%		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dokumen		
Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	93 desa/kelurahan (100%)		
Kapasitas Aparatur Desa	70%		
Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	30%		
Kawasan Kota Mandiri Terpadu	1 kawasan		
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT			
1.	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	17
		Jumlah Puskesmas Pembantu	64
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%
		Angka Usia Harapan Hidup	71.61
2.	Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	39
		Jumlah Bidan	179
		Jumlah Perawat	181
		Jumlah Dokter per Puskesmas	1 dokter
		Rasio penduduk dengan Bidan	1 : 964
		Rasio penduduk dengan Perawat	1 : 1.185
3.	Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	72.6
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	85%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
4.	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	78%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	50 % dari sasaran 5 %
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	50 % dari sasaran 70 %
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68%
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%
		Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	95%
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	95%
		Cakupan kunjungan bayi	89%
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	85%
		Cakupan pelayanan nifas	80%
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70%
		Cakupan desa siaga aktif	45%
		cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30%
		RTS-Miskin	5.263 RT miskin
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	20.30%
		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	160
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	25.04
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	36
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	20
		Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	18
advokasi perlindungan perempuan dan anak	1		

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI VI : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT			
1.	Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%
		Persentase konflik lahan masyarakat	10%
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali sosialisasi
2.	Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan
MISI VII : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI, PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN BUDAYA			
1.	Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	1 sistem informasi
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4 lokasi
		Pengamanan Kawasan Konservasi	1 paket
		Jelasnya zonasi	1 Perda tentang RTRW
		Ketaatan terhadap RTRW	70%
		Luas wilayah produktif (Ribu Ha)	33,698.26
		Luas wilayah industri (Ribu Ha)	110
		Luas wilayah banjir (Ribu Ha)	11,229.57
		Luas wilayah perkotaan (Ribu Ha)	1,325
2.	Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 kegiatan
3.	Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	1 paket reboisasi
		Masyarakat peduli lingkungan	40%
		Pelanggar hukum	0%
MISI VIII : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS			
1.	Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
2.	Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama
3.	Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 20%
		Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	62
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	6
		Event seni dan budaya (event)	5
4.	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	29 Organisasi masyarakat
		Jumlah organisasi pemuda	13 unit
		Jumlah kegiatan kepemudaan	17 kegiatan
		Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	1 kali sosialisasi
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan
		Kegiatan pembinaan politik daerah	9 kegiatan
		Jumlah demo	1
		Jumlah LSM	9 LSM
6.	Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jenis dan jumlah Kegiatan	4 jenis bantuan
		Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	150 KK
		Jumlah lansia yang dilayani	45 orang
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	5 orang
		menurunnya angka anak terlantar pertahun	turun 10% dari tahun 2012
		para penyandang cacat di seluruh kecamatan	turun 10% dari total penyandang cacat 2012
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	3 orang

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	2 orang
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	turun 10% dari total penyandang 2012
		Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	15 orang

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI IX : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DISETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLIT UNTUK BERPRESTASI			
1.	Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	40%
		Lapangan olahraga	8 unit
		Jumlah Sarana Olahraga	12
2.	Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	10 atlit
		Jumlah kegiatan olahraga	14 kegiatan
		Jumlah organisasi olahraga	13 unit
		Jumlah Club Olahraga	100
3.	Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	24 juta rupiah
4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Meningkat 20% dari sasaran 50%

Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar **Rp. 994.345.082.670,72** yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 355.535.450.029,87** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 638.809.632.640,85**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pemerintah Kabupaten
Tahun

: Tanjung Jabung Timur
: 2013

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI I : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN			
1.	Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	Panjang Jalan Kabupaten	966,55 Km
		Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44.70%
		Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	81.27%
		Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	12 mobil pickup;9 truk PS; 1 Kapal roro
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	86.600 orang
		Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	3 unit
		Jumlah angkutan darat	10.565 unit
		Pemasangan rambu-rambu	135
		Jalan desa dilalui roda empat	207,80 KM
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	107 m/kendaraan
		Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	615, 28 KM
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50 M
		Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	43.75%
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	17%
2.	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540
		Peningkatan rasio elektrifikasi	70%
		Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	30.00%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
3.	Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	75.00%
		Luas irigasi dalam kondisi baik	75.00%
		Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Pembangunan Tanggul : 59.502 M ¹ ; rehab Irigasi : 42.984 M ¹ ; Pintu air : 5 unit; OP :352.001 M
4.	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Transportasi / komunikasi dua arah yang efektif	efektif
5.	Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540
		Peningkatan jaringan telekomunikasi	Kabel 3%; Seluler 90%
6.	Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	1 Unit
		adanya kemudahan berinvestasi	32 jenis izin
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	2 dokumen
7.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	32.00%
		Persentase rumah layak huni	89.60%
		Persentase peningkatan rumah sehat	47.20%
		Rasio pemukiman layak huni	76.83%
		Akses sanitasi layak	47.20%
		Persentase penanganan sampah	36.00%
		Adanya pola kemitraan dengan Swasta	2 pengembangan perumahan
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI (PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS)			
1.	Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	Angka Rata-rata lama sekolah	7,16 Tahun
		Angka melek huruf	93.90%
		APK SD/Sederajat	113.98%
		APK SMP/Sederajat	105.10%
		APK SMA/Sederajat	76%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Meningkatnya APK PAUD	46.79%
		Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Sederajat	94.60%
		APM SMP/Sederajat	62.78%
		APM SMA/Sederajat	62.78%
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	96.28
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	1 : 151
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	1 : 14
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	208+44
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	82.76
		Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	229 unit
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	1 : 326
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	1 : 12
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	32
		Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	40.00%
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	1 perda
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/ sederajat	99.90%
		Berdirinya perguruan tinggi	1 Perguruan Tinggi
		Jumlah perpustakaan (unit)	2
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.214 orang
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	31,527
		Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	45 siswa SDLB
2.	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	1 unit

MISI III : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
1.	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	69.00%
		Jumlah PNS Daerah	4,820
		Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	93.00%
		Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas intern	65%
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,8/10.000 penduduk
2.	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran
3.	Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kelurahan (100%)
		Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	5 jenis pelayanan
4.	Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya Prioritas Calon CPNS	40%
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 kali ujian kompetensi
		CPNS yang bebas KKN	100%
5.	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	38,1 Milyar
6.	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Insentif Pegawai SARA meningkat	Rp. 600.000,00
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Rp. 600.000,00
7.	Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	1 perda
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Meningkat 24,89%
		Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terealisasi di 11 kecamatan
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	90%
		Rasio pasangan berakte nikah	55%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	100%
		Laju pertumbuhan penduduk	0.67%
		Pengembangan sistem jaringan e-government	7 MBPS
		Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	1 website
		Sistem informasi daerah berbasis website	1 website
		Pelayanan publik bebas dari KKN	100%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA LAINNYA.			
1.	Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	32 jenis perizinan
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	US\$ 16.302
2.	Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	Nilai Ekspor (US\$)	87,67 Juta
		Nilai Impor (US\$)	17,35 Juta
		Laju inflasi	4.10%
		PDRB atas harga berlaku	IDR 13.016.251,56 Juta
		Pertumbuhan PDRB	6.37
		PDRB per kapita (Rp.juta)	13.40
		Jenis dan jumlah bank	7
		Jumlah Penduduk (jiwa)	214,517
		Jumlah Sentra industri kecil	10 unit
3.	Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat
		Kantaya LKPM	Meningkat
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Tingkat kemiskinan	8.75
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	91.75
		Lambung pangan	3
		desa ketahanan pangan	14 desa mandiri pangan
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	93 Gapoktan
		Jumlah Desa Rawan Pangan	28 Desa
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	60
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	113
		Jumlah UKM	352 unit
		Jumlah/UKM yang berperan	352 unit
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	20 orang/unit
		UKM Unggulan	35 UKM
		Jumlah koperasi handal	272 koperasi
Persentase koperasi aktif	36.40%		
Produk Unggulan	14 produk		
5.	Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	Jumlah TK yang terserap	1,240
		UMR	Rp. 1.200.000

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Jumlah Pelatihan	6 kali
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	15 perusahaan
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	97.50%
		Angka kesempatan kerja	102,094 orang
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	45.20%
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11.30%
		Partisipasi angkatan kerja wanita	39.55%
6.	Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	1 biro
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	50%
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	10
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkatnya kunjungan wisata 25%
		Kunjungan wisata (orang)	12,500
		Sarana wisata (hotel & restoran)	6 + 272
		Objek Wisata	10
7.	Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Potensi Lahan	56.496 Ha
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	31.851 Ha
		Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	13.030 Ha
		Penguatan Kelompok Tani	1.168 Kelompok
		Nilai Tukar Petani (%)	97.72%
		Produktivitas Padi	36,5 Kwt/ha
		Produktivitas kedelai	13,7 kwt/ha
		Produktivitas karet	0,30 ton/ha
		Produktivitas kelapa sawit	2,49 ton/ha
		Produktivitas kopi	0,54 ton/ha
		Produksi Padi	112.828 ton
		Produksi Jagung	5.647 ton
		Jumlah Sapi (ekor)	14.300 ekor
		Jumlah Kambing (ekor)	27.125 ekor
		Jumlah kerbau (ekor)	509 ekor
		Jumlah domba (ekor)	303 ekor

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Produksi daging ruminansia besar	119,6 ton
		Lembaga ekonomi mikro	6 unit
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	305
		Terpenuhi sarana prasarana pertanian	27.00%
		Pencegahan penularan penyakit ternak	26.000 dosis
		fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	2 unit Pasar Hewan

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Ikan Laut (ton)	32.400 Ton
		Ikan Perairan Umum (ton)	760 Ton
		Ikan Kolam (ton)	300 Ton
8.	Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	1 perda
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	2 kali
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus
		Kerusakan lingkungan	0 kasus
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	2 kali
9.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	1 kawasan
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	20%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dokumen
		Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	93 desa/kelurahan (100%)
		Kapasitas Aparatur Desa	70%
		Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	30%
		Kawasan Kota Mandiri Terpadu	1 kawasan
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT			
1.	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	17
		Jumlah Puskesmas Pembantu	64
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%
		Angka Usia Harapan Hidup	71.61
2.	Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	39
		Jumlah Bidan	179
		Jumlah Perawat	181
		Jumlah Dokter per Puskesmas	1 dokter
		Rasio penduduk dengan Bidan	1 : 964
		Rasio penduduk dengan Perawat	1 : 1.185
3.	Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	72.6
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	85%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
4.	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	78%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	50 % dari sasaran 5 %
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	50 % dari sasaran 70 %
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68%
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%
		Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	95%
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	95%
		Cakupan kunjungan bayi	89%
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	85%
		Cakupan pelayanan nifas	80%
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70%
		Cakupan desa siaga aktif	45%
		cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30%
		RTS-Miskin	5.263 RT miskin
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	20.30%
		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	160
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	25.04
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	36
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	20
		Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	18
advokasi perlindungan perempuan dan anak	1		

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI VI : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT			
1.	Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%
		Persentase konflik lahan masyarakat	10%
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali sosialisasi
2.	Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan
MISI VII : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI, PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN BUDAYA			
1.	Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	1 sistem informasi
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4 lokasi
		Pengamanan Kawasan Konservasi	1 paket
		Jelasnya zonasi	1 Perda tentang RTRW
		Ketaatan terhadap RTRW	70%
		Luas wilayah produktif (Ribu Ha)	33,698.26
		Luas wilayah industri (Ribu Ha)	110
		Luas wilayah banjir (Ribu Ha)	11,229.57
		Luas wilayah perkotaan (Ribu Ha)	1,325
2.	Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 kegiatan
3.	Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	1 paket reboisasi
		Masyarakat peduli lingkungan	40%
		Pelanggar hukum	0%
MISI VIII : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS			
1.	Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
2.	Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama
3.	Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 20%
		Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	62
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	6
		Event seni dan budaya (event)	5
4.	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	29 Organisasi masyarakat
		Jumlah organisasi pemuda	13 unit
		Jumlah kegiatan kepemudaan	17 kegiatan
		Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	1 kali sosialisasi
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan
		Kegiatan pembinaan politik daerah	9 kegiatan
		Jumlah demo	1
		Jumlah LSM	9 LSM
6.	Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jenis dan jumlah Kegiatan	4 jenis bantuan
		Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	150 KK
		Jumlah lansia yang dilayani	45 orang
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	5 orang
		menurunnya angka anak terlantar pertahun	turun 10% dari tahun 2012
		para penyandang cacat di seluruh kecamatan	turun 10% dari total penyandang cacat 2012
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	3 orang

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
		Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	2 orang
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	turun 10% dari total penyandang 2012
		Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	15 orang

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013
MISI IX : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DISETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLIT UNTUK BERPRESTASI			
1.	Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	40%
		Lapangan olahraga	8 unit
		Jumlah Sarana Olahraga	12
2.	Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	10 atlit
		Jumlah kegiatan olahraga	14 kegiatan
		Jumlah organisasi olahraga	13 unit
		Jumlah Club Olahraga	100
3.	Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	24 juta rupiah
4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Meningkat 20% dari sasaran 50%

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pemerintah Kabupaten
Tahun

: Tanjung Jabung Timur
: 2013

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
MISI I : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN					
1.	Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	Panjang Jalan Kabupaten	966,55 Km	976,55 Km	101.03
		Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44.70%	31.46%	70.38
		Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	81.27%	64.52%	79.39
		Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	12 mobil pickup;9 truk PS; 1 Kapal roro	9 mobil pickup;9 truk PS; 1 Kapal roro	mobil pickup : 75%; truk PS : 100%; Kapal roro : 100%
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	86.600 orang	111.558 orang	128.82
		Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	3 unit	2 unit	66.67
		Jumlah angkutan darat	10.565 unit	15.247 unit	144.32
		Pemasangan rambu-rambu	135 unit	161 unit	119.26
		Jalan desa dilalui roda empat	207,80 KM	210,43 Km	101.27
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	107 m/kendaraan	107 m/kendaraan	100
		Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	615,28 Km	605,28 Km	98.38
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50 M	165 M	330.00
		Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	43.75%	3.00%	6.86
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	17%	8.24%	48.47
		Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	19%	6.35%	33.42
2.	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540	980	181.47
		Peningkatan rasio elektrifikasi	70%	73%	104.29
		Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	30.00%	15.75%	52.50
3.	Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	75.00%	65.00%	86.67
		Luas irigasi dalam kondisi baik	75.00%	65.00%	86.67
		Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Pembangunan Tanggul : 59.502 M ¹ ; rehab Irigasi : 42.984 M ¹ ; Pintu air : 5 unit; OP :352.001 M	Pembangunan Tanggul : 125.080 M ¹ ; rehab Irigasi : 42.984 M ¹ ; Pintu air : 4 unit; OP :352.000 M	Pembangunan Tanggul : 210%; rehab Irigasi : 100%; Pintu air : 80%; OP :60%

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
4.	Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Transportasi / komunikasi dua arah yang efektif	efektif	60%	60%
5.	Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540	980	181.47
		Peningkatan jaringan telekomunikasi	Kabel 3%; Seluler 90%	Kabel 3%; Seluler 90%	100

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
6.	Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	1 Unit	1 Unit	100
		adanya kemudahan berinvestasi	32 jenis izin	31 jenis izin	96.88
		Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	2 dokumen	2 dokumen	100
7.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	32.00%	37.36%	116.75
		Persentase rumah layak huni	89.60%	89.00%	99.33
		Persentase peningkatan rumah sehat	47.20%	32.24%	68.31
		Rasio pemukiman layak huni	76.83%	75.50%	98.27
		Akses sanitasi layak	47.20%	31.22%	66.15
		Persentase penanganan sampah	36.00%	40.00%	111.11
		Adanya pola kemitraan dengan Swasta	2 pengembangan perumahan	2 pengembangan perumahan	100
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI (PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS)					
1.	Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	Angka Rata-rata lama sekolah	7,16 Tahun	6,30 Tahun	87.99
		Angka melek huruf	93.90%	97.07%	103.38
		APK SD/Sederajat	113.98%	110.00%	96.51
		APK SMP/Sederajat	105.10%	104.70%	99.62
		APK SMA/Sederajat	76%	65%	85.53
		Meningkatnya APK PAUD	46.79%	44.97%	96.11
		Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Sederajat	94.60%	97.06%	102.60
		APM SMP/Sederajat	62.78%	78.74%	127.45
		APM SMA/Sederajat	62.78%	58.92%	93.85
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	96.28	97.06	100.81
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	1 : 151	1 : 117	129.06
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	1 : 14	1 : 16	87.50
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	208	251	120.67
		Angka Partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	82.76	65	78.54
		Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	229 unit	307 unit	134.06
		Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	1 : 32,6	1 : 38,4	84.90
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	1 : 12	1 : 11	109.00
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	32	40	125.00
		Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	40.00%	100.00%	250.00
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	1 perda	1 perda	100.00
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/ sederajat	99.90%	99.90%	100.00
Berdirinya perguruan tinggi	1 Perguruan Tinggi	1 Perguruan Tinggi	100.00		
Jumlah perpustakaan (unit)	2	1	50.00		

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.214 orang	7.920 orang	652.39
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	31,527	25,583	81.15
		Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	45 siswa SDLB	48 siswa SDLB	106.67
2.	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	1 unit	1 unit	100.00
MISI III : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL					
1.	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepegangatan dan karier	69.00%	60.00%	86.96
		Jumlah PNS Daerah	4,820	4,562	94.65
		Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	93.00%	99.00%	106.45
		Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas intern	65%	50%	76.92
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,8/10.000 penduduk	3,7/10.000 penduduk	77.08
2.	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran	100.00
3.	Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kelurahan (100%)	93 desa/kelurahan (100%)	100.00
		Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan meningkat	5 jenis pelayanan	5 jenis pelayanan	100.00
4.	Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya Prioritas Calon CPNS	40%	40%	100.00
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 kali ujian kompetensi	1 kali ujian kompetensi	100.00
		CPNS yang bebas KKN	100%	100%	100.00
5.	Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	38,1 Milyar	38,17 Milyar	100.00
6.	Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Insentif Pegawai SARA meningkat	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	100.00
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	100.00
7.	Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	1 perda	1 perda	100.00
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP	31 SOP	100.00
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Meningkat 24,89%	26%	104.46
		Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terealisasi di 11 kecamatan	Terealisasi di 11 kecamatan	100.00
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	90%	78.69%	87.43
		Rasio pasangan berakte nikah	55%	7.75	14.09
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	100%	49.81%	49.81
		Laju pertumbuhan penduduk	0.67%	0.66%	101.52
		Pengembangan sistem jaringan e-government	7 MBPS	6 MBPS	85.71

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
		Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	1 website	1 website	100.00
		Sistem informasi daerah berbasis website	1 website	1 website	100.00
		Pelayanan publik bebas dari KKN	100%	100%	100.00
MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA LAINNYA.					
1.	Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	32 jenis perizinan	31 jenis perizinan	96.88
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	US\$ 16.302	US\$ 96.675,5	593.03

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
2.	Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	Nilai Ekspor (US\$)	87,67 Juta	81,86 juta	93.37
		Nilai Impor (US\$)	17,35 Juta	16,24 juta	93.60
		Laju inflasi	4.10%	7.09%	172.93
		PDRB atas harga berlaku	IDR 13.016.251,56 Juta	IDR 13.566.681,05 Juta	104.23
		Pertumbuhan PDRB	6.37	6.37	100.00
		PDRB per kapita (Rp.juta)	13.40	13.87	103.51
		Jenis dan jumlah bank	7	7	100.00
		Jumlah Penduduk (jiwa)	214,517	212,918	100.75
		Jumlah Sentra industri kecil	10 unit	10 unit	100.00
3.	Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat	Diprogramkan	0.00
		Kantaya LKPM	Meningkat	Diprogramkan	0.00
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Tingkat kemiskinan	8.75	12.5	42.86
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	91.75	87.5	95.37
		Lumbung pangan	3	3	100.00
		desa ketahanan pangan	14 desa mandiri pangan	14 desa mandiri pangan	100.00
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	93 Gapoktan	93 Gapoktan	100.00
		Jumlah Desa Rawan Pangan	28 Desa	14 Desa	200.00
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	60	76.7	127.83
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	113	100.08	88.57
		Jumlah UKM	352 unit	1.441 unit	409.38
		Jumlah/UKM yang berperan	352 unit	1.441 unit	409.38
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	20 orang/unit	11 orang/unit	55.00
		UKM Unggulan	35 UKM	12 UKM	34.29
		Jumlah koperasi handal	272 koperasi	287 koperasi	105.51
		Persentase koperasi aktif	36.40%	40.42%	111.04
		Produk Unggulan	14 produk	10 produk	71.43
5.	Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	Jumlah TK yang terserap	1,240	831	67.00
		UMR	Rp. 1.200.000	Rp. 1.300.000	108.33
		Jumlah Pelatihan	6 kali	3 kali	50.00
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	15 perusahaan	35 perusahaan	233.33
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	97.50%	69.96%	71.76
		Angka kesempatan kerja	102.094 orang	104.901 orang	102.75
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	45.20%	45.00%	99.56
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11.30%	11.30%	100.00
		Partisipasi angkatan kerja wanita	39.55%	33.81%	85.49
6.	Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	1 biro	1 biro	100.00
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	50%	Diprogramkan	0.00
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	10%	Diprogramkan	0.00
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkat 15 %	60.00
		Kunjungan wisata (orang)	12,500	13,831	110.65
		Sarana wisata (hotel & restoran)	6 + 272	6 + 272	100.00

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
	Objek Wisata	10	6	60.00

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
7.	Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Potensi Lahan	56.496 Ha	39.303 Ha	69.57
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	31.851 Ha	27.658 Ha	86.84
		Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	13.030 Ha	704,85 Ha	5.41
		Penguatan Kelompok Tani	1.168 Kelompok	1.159 kelompok	99.23
		Nilai Tukar Petani (%)	97.72%	97.10%	99.37
		Produktivitas Padi	36,5 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	98.71
		Produktivitas kedelai	13,7 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	94.16
		Produktivitas karet	0,30 ton/ha	0,76 ton/ha	253.33
		Produktivitas kelapa sawit	2,49 ton/ha	2,14 ton/ha	85.94
		Produktivitas kopi	0,54 ton/ha	0,47 ton/ha	87.04
		Produksi Padi	112.828 ton	104.433 ton	92.56
		Produksi Jagung	5.647 ton	1.636 ton	28.97
		Jumlah Sapi (ekor)	14.300 ekor	15.377 ekor	107.53
		Jumlah Kambing (ekor)	27.125 ekor	34.743 ekor	128.08
		Jumlah kerbau (ekor)	509 ekor	142 ekor	27.90
		Jumlah domba (ekor)	303 ekor	143 ekor	47.19
		Produksi daging ruminansia besar	119,6 ton	142 ton	118.73
		Lembaga ekonomi mikro	6 unit	6 unit	100.00
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	305	305	100.00
		Terpenuhi sarana prasarana pertanian	27.00%	48.35	179.07
		Pencegahan penularan penyakit ternak	26.000 dosis	26.805 dosis	103.10
fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	2 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	100.00		
Ikan Laut (ton)	32.400 Ton	25.430 Ton	78.49		
Ikan Perairan Umum (ton)	760 Ton	685 Ton	99.14		
Ikan Kolam (ton)	300 Ton	300 Ton	100.00		
8.	Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	1 perda	Diprogramkan	0.00
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	2 kali	2 kali	100.00
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus	0 kasus	100.00
		Kerusakan lingkungan	0 kasus	0 kasus	100.00
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus	0 kasus	100.00
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	2 kali	2 kali	100.00
9.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	1 kawasan	1 kawasan	100.00
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	20%	20%	100.00
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dokumen	18 dokumen	360.00
		Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	93 desa/kelurahan (100%)	93 desa/kelurahan (100%)	100.00
		Kapasitas Aparatur Desa	70%	24.66%	35.23
		Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	30%	30%	100.00
		Kawasan Kota Mandiri Terpadu	1 kawasan	1 kawasan	100.00
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT					
1.	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	17	17	100.00
		Jumlah Puskesmas Pembantu	64	58	90.63
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%	95.24%	97.18

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%	96%	101.06
		Angka Usia Harapan Hidup	71.61	71.42	99.73

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
2.	Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	39	33	84.62
		Jumlah Bidan	179	255	143.26
		Jumlah Perawat	181	273	150.83
		Jumlah Dokter per Puskesmas	1 dokter	1 dokter	100.00
		Rasio penduduk dengan Bidan	1 : 964	1 : 867	111.19
		Rasio penduduk dengan Perawat	1 : 1.185	1 : 810	146.30
3.	Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	72.6	72.52	99.89
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	85%	100%	117.65
4.	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun (10%)	7.70%	77.00
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	78%	78%	100.00
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	50 % dari sasaran 5 % (12%)	8.70%	72.50
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	50 % dari sasaran 70 % (81%)	82%	101.23
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak	2 anak	100.00
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68.00%	71.07%	104.51
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80.00%	90.37%	112.96
		Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	95.00%	89.20%	93.89
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	95.00%	100.00%	105.26
		Cakupan kunjungan bayi	89.00%	96.11%	107.99
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	85.00%	89.44%	105.22
		Cakupan pelayanan nifas	80.00%	92.06%	115.08
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70.00%	66.21%	94.59
		Cakupan desa siaga aktif	45.00%	44.09%	97.98
		cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30.00%	15.00%	50.00
		RTS-Miskin	5.263 RT miskin	6.553 RT miskin	80.31
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	20.30%	20.12%	100.89
		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	160	127	125.98
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	25.04	22.69	110.36
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	36	24.25	148.45
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	20	21.9	91.32
		Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	18%	0.95%	1894.74
Advokasi perlindungan perempuan dan anak	1	1	100.00		
MISI VI : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT					
1.	Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%	100%	100.00
		Persentase konflik lahan masyarakat	10%	10%	100.00

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali sosialisasi	3 kali sosialisasi	100.00
2.	Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan	1 aturan	100.00
MISI VII : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI, PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN BUDAYA					
1.	Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	1 sistem informasi	1 sistem informasi	100.00
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4 lokasi	2 lokasi	50.00
		Pengamanan Kawasan Konservasi	1 paket	1 paket	100.00
		Jelasnya zonasi	1 Perda tentang RTRW	1 Perda tentang RTRW	100.00
		Ketaatan terhadap RTRW	70%	75%	107.14
		Luas wilayah produktif (Ribu Ha)	33,698.26	89,682	266.13
		Luas wilayah industry (Ribu Ha)	110	1,120	1018.18
		Luas wilayah banjir (Ribu Ha)	11,229.57	6,565.48	171.04
		Luas wilayah perkotaan (Ribu Ha)	1,325	547.49	41.32
2.	Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00
3.	Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	1 paket reboisasi	1 paket reboisasi	100.00
		Masyarakat peduli lingkungan	40%	60%	150.00
		Pelanggar hukum	0%	10%	0.00
MISI VIII : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS					
1.	Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100.00
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100.00
2.	Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama	100% tercipta ketentraman dan kerukunan umat beragama / tidak ada konflik agama	100.00
3.	Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 20%	1 kajian (20%)	100.00
		Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	62	40	64.52
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	6	6	100.00
		Event seni dan budaya (event)	5	4	80.00
4.	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	29 Organisasi masyarakat	33 Organisasi masyarakat	113.79
		Jumlah organisasi pemuda	13	13	100.00
		Jumlah kegiatan kepemudaan	17 kegiatan	9 kegiatan	52.94
		Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat	Meningkat	100.00

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	1 kali sosialisasi	11 kali sosialisasi	1100.00
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan	4 kegiatan	133.33
		Kegiatan pembinaan politik daerah	9 kegiatan	6 kegiatan	66.67
		Jumlah demo	1	1	100.00
		Jumlah LSM	9 LSM	37 LSM	411.11

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	PERSENTASE (%)
6.	Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jenis dan jumlah Kegiatan	4 jenis bantuan	4 jenis bantuan	100.00
		Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	150 KK	100 KK	66.67
		Jumlah lansia yang dilayani	45 orang	53 orang	117.78
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	5 orang	15 orang	300.00
		menurunnya angka anak terlantar pertahun	turun 10% dari tahun 2012	turun 10%	100.00
		para penyandang cacat di seluruh kecamatan	turun 10% dari total penyandang cacat 2012	turun 10%	100.00
		Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	3 orang	4 orang	133.33
		Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	2 orang	4 orang	200.00
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	turun 10% dari total penyandang 2012	turun 10%	100.00
		Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	15 orang	20 orang	133.33

MISI IX : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DISETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLIT UNTUK BERPRESTASI

1.	Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	40%	73%	182.50
		Lapangan olahraga	8 unit	4 unit	50.00
		Jumlah Sarana Olahraga	12 unit	5 unit	41.67
2.	Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	10 atlit	4 atlit	40.00
		Jumlah kegiatan olahraga	14 kegiatan	9 kegiatan	64.29
		Jumlah organisasi olahraga	13 unit	13 unit	100.00
		Jumlah Club Olahraga	100	96	96.00
3.	Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	24 juta rupiah	25,9 juta rupiah	107.92
4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Meningkat 20% dari sasaran 50%	Meningkat 20%	100.00